



Menuju Bentuk Kerjasama yang Lebih Berkesetaraan

Kontribusi Masyarakat Lokal bagi Konsesi Pengusahaan Kayu

Krister Andersson

Ashwin Ravikumar

Esther Mwangi

Manuel Guariguata

Robert Nasi

Menuju Bentuk Kerjasama yang Lebih Berkesetaraan

Kontribusi Masyarakat Lokal bagi Konsesi Pengusahaan Kayu

Krister Andersson

University of Colorado, Boulder

Ashwin Ravikumar

University of Colorado, Boulder

Esther Mwangi

CIFOR

Manuel Guariguata

CIFOR

Robert Nasi

CIFOR

Occasional Paper 72

© 2011 Center for International Forestry Research
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN 978-602-8693-74-5

Andersson, K., Ravikumar, A., Mwangi, E., Guariguata, M. dan Nasi, R., 2011 Menuju bentuk kerjasama yang lebih berkesetaraan: kontribusi masyarakat lokal bagi konsesi perusahaan kayu. Occasional Paper 72. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Foto sampul © Jan van der Ploeg

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622
F +62 (251) 8622-100
E cifor@cgiar.org

www.cifor.org

Apa pun yang dinyatakan dalam makalah ini merupakan pendapat para penulis. Pendapat tersebut tidak serta merta mencerminkan pendapat CIFOR, lembaga para penulis atau pihak-pihak yang mendanai makalah ini.

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
2	Latar Belakang dan Pendekatan Tinjauan	5
2.1	Tujuan Penelitian dan Berbagai Pertanyaan	5
2.2	Kriteria Studi dan Ruang Lingkup Penelusuran	6
2.3	Metode Tinjauan Sistematis	6
3	Pertanyaan 1: Keterampilan dan Keahlian Lokal Apakah yang Penting bagi Pengelolaan Konsesi Kayu?	9
4	Pertanyaan 2: Bagaimana Caranya agar Interaksi Masyarakat Lokal dan Pengelola Konsesi dapat Saling Menguntungkan?	11
4.1	Kesepakatan Pembagian Keuntungan	11
4.2	Kesepakatan Pengelolaan Bersama atau Produksi Bersama	12
4.3	Skema Pengelolaan Kemitraan Hutan Tanaman (<i>Outgrower</i>)	12
5	Pertanyaan 3: Ketika terjadi peristiwa konflik antara masyarakat dengan konsesi, bagaimana cara masyarakat mengatur untuk mempertahankan klaim mereka?	15
6	Pertanyaan 4: Bagaimana cara meningkatkan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan konsesi?	19
6.1	Reformasi Hak Kepemilikan	19
6.2	Kebijakan Desentralisasi	21
6.3	Peraturan dan Standar yang Terpusat	22
7	Kesimpulan: Identifikasi Kesenjangan Pengetahuan	25
8	Referensi	27
	Lampiran	31
1	Berbagai metodologi dari sejumlah penelitian yang ditinjau	31
2	Penilaian penelitian yang berbasiskan data	35

Daftar Gambar dan Tabel

Tabel

1	Manfaat kemitraan konsesi-masyarakat	13
---	--------------------------------------	----

Gambar

1	Berbagai metodologi dari studi yang digunakan	6
2	Peluang kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan konsesi kayu	10
3	Pengaturan yang saling menguntungkan antara perusahaan kayu dan masyarakat	14
4	Mekanisme bagi masyarakat untuk mempertahankan hak mereka ketika terjadi konflik	17

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih pada Alain Karsenty, Moira Moeliono dan Cesar Sabogal untuk masukan-masukan yang bermanfaat. Semua kesalahan terletak pada kami sendiri. Pengeditan dokumen dilakukan oleh Lanny Irewati Utoyo. Meilinda Wan dan Manuel Boissierre meninjau ulang terjemahan bahasa Indonesia dan Perancis. Kami sangat berterimakasih untuk pengeditan dan penerjemahan dokumen yang dilakukan dengan teliti.

1

Pendahuluan

Kajian ini meneliti interaksi antara masyarakat dan perusahaan kayu di berbagai wilayah konsesi. Fokus ini sebagian besar dimotivasi oleh meluasnya kekhawatiran bahwa sering kali masyarakat lokal mengalami kerugian ekonomi maupun kerugian lain akibat proses pembalakan kayu di sejumlah negara berkembang. Dengan menyelidiki interaksi yang ada antara masyarakat dan perusahaan – termasuk bagaimana pengaturan dapat saling menguntungkan atau tidak, dan bagaimana sejumlah konflik dapat diselesaikan secara lebih mudah atau lebih sulit – penelitian ini menciptakan kerangka kerja untuk penyelidikan lebih lanjut dari permasalahan tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang interaksi masyarakat – perusahaan dalam konsesi kayu dapat menjadi bahan informasi untuk kebijakan yang lebih baik untuk membantu masyarakat mempertahankan hak mereka, dan menyediakan masukan tentang kondisi yang memungkinkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam sistem ekologi sosial hutan.

Walaupun saat ini pengetahuan tentang hubungan antara pengguna hutan lokal dan pemegang konsesi kayu meningkat, pemahaman tentang alasan di balik beragamnya hasil dari kemitraan antar kelompok yang nampaknya bermaksud baik masih sangat terbatas. Mengapa ada usaha yang berhasil dalam menciptakan kesepakatan saling menguntungkan, sementara usaha lainnya tidak? Faktor-faktor kontekstual dan struktural apa saja yang dapat menjelaskan variasi hasil tersebut? Studi ini bertujuan mencari jawaban untuk berbagai pertanyaan ini. Kami melakukannya

secara sistematis dengan meninjau sejumlah besar studi empiris dari beragam konteks baik nasional maupun lokal. Lebih khusus lagi, kami mengamati berbagai macam keterampilan dan keahlian lokal yang penting bagi pengelolaan konsesi kayu yang baik, bagaimana masyarakat lokal dan pengelola konsesi dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan, sejumlah strategi yang paling efektif bagi masyarakat untuk mempertahankan klaim mereka dalam konflik dengan perusahaan swasta, dan beberapa jenis kebijakan publik yang mendukung bentuk yang berkesetaraan dari kerjasama dalam pengelolaan konsesi hutan.

Penemuan utama dari tinjauan literatur ini adalah bahwa konteks kelembagaan pada tingkat nasional maupun lokal dapat menjelaskan secara kritis mengapa hubungan antara sebagian masyarakat dan pihak konsesi dapat saling menguntungkan, sedangkan sebagian lainnya hanya menguntungkan pihak pemegang konsesi saja. Beberapa studi yang telah dilakukan mengarah pada satu hasil yang sama: bila konsesi perusahaan hutan dibiarkan beroperasi tanpa batasan sosial maupun politik yang efektif pada tingkat nasional dan lokal, maka sebagian besar masyarakat lokal dirugikan dalam penyelenggaraan konsesi tersebut. Namun demikian, sebagian besar studi sepakat juga bahwa apabila konsesi secara efektif dibatasi, maka masyarakat mengalami lebih sedikit kerugian atau bahkan pada beberapa kasus memperoleh keuntungan bersih.

Tinjauan literatur ini secara sistematis meninjau 42 publikasi yang terkait dengan topik Kontribusi

Masyarakat Lokal terhadap Konsesi Pengelolaan Kayu. Tinjauan kami mengidentifikasi tiga kesenjangan utama – beberapa aspek yang menurut kami kurang didalami oleh para peneliti saat ini. Pertama, **analisis empiris mendasar tentang interaksi antara masyarakat dan pemegang konsesi kayu secara umum masih kurang**. World Bank (2009) telah mengumpulkan data primer dari berbagai ahli yang terlibat dalam kemitraan konsesi-masyarakat, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ciri terpenting untuk berhasilnya kemitraan. Sama halnya dengan Nawir dkk. (2003) yang mengumpulkan data lapangan pada tiga konsesi di Kalimantan Timur, bekerja sama dengan para pemegang konsesi, dengan tujuan untuk mengetahui motivasi dan dampak dari penataan hubungan masyarakat-perusahaan yang berbeda. Namun, di samping kedua penelitian tersebut, hanya terdapat sedikit koleksi data lapangan yang sistematis untuk melakukan analisis komparatif tentang topik ini. Berbagai studi lain telah mengumpulkan data lapangan untuk membahas beberapa isu terkait konsesi hutan dan aspek sosial secara umum, namun tidak secara khusus berfokus pada interaksi antara pemegang konsesi kayu dan masyarakat lokal (misalnya, lihat antara lain: Mendoza dan Prabhu 2000, Palmer 2004, Donovan dan Puri 2004, Becker dan Ghimire 2003, Thapa dkk. 1995).

Kesenjangan yang ke dua mengacu pada **kurangnya pandangan/opini masyarakat tentang hubungan antara konsesi dan masyarakat**.

Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh World Bank (2009) secara umum telah gagal untuk menangkap sudut pandang masyarakat tersebut. Dari 89 aktor yang diwawancarai dalam studi tersebut, hanya satu yang merupakan perwakilan masyarakat. Ketika berbicara tentang hubungan antara konsesi dan masyarakat, menilai faktor apa sajakah yang berfungsi dan yang tidak merupakan hal yang sangat sulit, jika analisis tersebut hanya mempertimbangkan salah satu sisi dari hubungan tersebut. Namun, kami menjumpai beberapa studi yang didasarkan pada data dari kelompok pengguna sumber daya lokal. Nawir dkk. (2003) menyajikan penemuan yang diperoleh dari studi lapangan pada masyarakat yang terkena dampaknya, meskipun metodologi survei yang digunakan tidak jelas. Menton dkk.

(2009) juga melakukan wawancara dengan para pengguna (catatan harian sebagai sumber daya dari lokakarya partisipatif, dan survei rumah tangga dua mingguan) untuk penelitian mereka tentang dampak kemitraan masyarakat dan perusahaan (CCP) terhadap masyarakat terkait hasil hutan nonkayu (HHNK) di Brasil. Mereka menemukan bahwa konsumsi HHNK pada hutan CCP tidak berdampak signifikan dibandingkan dengan hutan nonCCP, meskipun terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa pembalakan dapat mengurangi ketersediaan spesies buru. Meski terdapat sudut pandang anggota masyarakat dan ada peluang yang mereka lihat yang dapat menjadikan pengaturan konsesi lebih berpihak kepada mereka, studi tersebut sebagian besar masih kurang dikaji dalam literatur yang lebih luas.

Terakhir, nampaknya **kawasan hak milik nasional dan hak menurut undang-undang yang terkait**, dan khususnya pada tingkat mana masyarakat lokal menikmati kemenangan dalam alokasi hak pengelolaan hutan di lahan tempat hidup mereka, **memiliki pengaruh besar terhadap kemungkinan konsesi memberikan hasil yang lebih berkesetaraan untuk masyarakat**. Sebagai contoh, pada kasus konsesi pembalakan Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) di Kalimantan Timur, Indonesia, Palmer (2004) mencatat bahwa merupakan hal yang umum bila area konsesi tumpang-tindih dengan lahan masyarakat, yang memicu timbulnya konflik atas akses dan hak pengguna. Konflik ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat maupun perusahaan kayu. Di sisi lain, setelah reformasi lahan tahun 1996 di Bolivia, tumpang-tindih semacam itu telah berkurang. Melalui reformasi tersebut, masyarakat lokal yang memiliki hak lahan mendapatkan keunggulan (hak pilih pertama) untuk mengajukan hak pengelolaan (Larson dkk. 2010). Jika menginginkannya, masyarakat lokal dapat mengajukan hak semacam itu untuk mereka sendiri atau dapat menjualnya kepada perusahaan komersial. Namun demikian, kami tidak menjumpai penelitian yang secara eksplisit membandingkan kasus kawasan tenurial yang bertentangan. Perbandingan antara Indonesia dan Bolivia di atas hanya merupakan satu kemungkinan pasangan. Satu kemungkinan arah penelitian dalam bidang ini di masa mendatang

adalah untuk membandingkan bagaimana hak-hak secara hukum yang bertentangan berinteraksi dengan pengaturan tata kelola yang bervariasi, seperti misalnya aturan yang dibuat sendiri tentang akses dan pemanfaatan, pemantauan dan pelaksanaan yang diorganisir sendiri, serta berbagai sistem pemberian sanksi lokal.

Makalah ini membahas empat pertanyaan dasar: 1) Keahlian lokal dan keterampilan apa yang penting untuk pengelolaan konsesi kayu? 2) Bagaimana caranya agar interaksi masyarakat

lokal dan pengelola konsesi dapat saling menguntungkan? 3) Dalam peristiwa konflik antara masyarakat dengan konsesi, bagaimana cara masyarakat mempertahankan klaim mereka? dan 4) Bagaimana cara meningkatkan kebijakan dan strategi pengelolaan konsesi? Berbagai pertanyaan ini membentuk struktur dasar dari kajian kami. Setelah uraian singkat mengenai latar belakang yang menjelaskan metode yang kami gunakan dalam melakukan tinjauan sistematis ini, kami menjawab keempat pertanyaan tersebut.

2

Latar Belakang dan Pendekatan Tinjauan

Walaupun tata kelola hutan di sejumlah negara berkembang berbeda, sebagian besar negara memiliki suatu sistem yang memberikan konsesi hutan kepada perusahaan, di mana pemerintah nasional menjual hak pengelolaan hutan sementara kepada perusahaan swasta atau perorangan untuk mengembangkan hasil hutan di area tersebut. Sebagian besar konsesi tersebut berfokus pada hasil-hasil kayu, meskipun terdapat peningkatan jumlah konsesi yang saat ini juga memiliki hak untuk memanen HHNK (FAO 2009). Sering kali masyarakat berinteraksi dengan perusahaan di lahan konsesi yang pernah, atau bahkan yang sedang digunakan. Kemungkinan interaksi antara masyarakat lokal dan pengelola konsesi hutan memiliki rentang yang cukup besar. Tujuan tinjauan sistematis ini adalah untuk menyatukan berbagai temuan tentang jenis interaksi-interaksi tersebut, dan menyoroti berbagai kesenjangan informasi yang ada berdasarkan analisis sintesis, serta menyarankan suatu area penelitian yang baru.

2.1 Tujuan Penelitian dan Berbagai Pertanyaan

Tujuan utama tinjauan literatur ini adalah untuk meneliti interaksi antara pemegang konsesi hutan dan masyarakat lokal di sejumlah negara berkembang. Secara khusus, kami ingin mencari jawaban dari empat aspek umum dalam empat pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas. Selanjutnya, kami menjabarkan dan menjelaskan maksud dari masing-masing pertanyaan tersebut.

Rangkaian pertanyaan yang pertama berfokus pada peran dari keahlian lokal dalam pengelolaan kayu. Keterampilan dan keahlian apa sajakah yang dapat menjadi kontribusi masyarakat lokal untuk meningkatkan pengelolaan konsesi sehingga lebih menguntungkan dan meningkatkan kelestarian lingkungan? Bagaimana cara berbagai keterampilan ini bervariasi dengan model konsesi yang sudah diterapkan? Bagaimana cara meningkatkan atau memperkuat serta mengkondisikan berbagai keterampilan ini dalam pengelolaan konsesi?

Rangkaian pertanyaan ke dua mengenai mekanisme kerja sama antara masyarakat dan pengelola konsesi yang saling menguntungkan. Bagaimana masyarakat lokal dan pengelola konsesi dapat berinteraksi dengan cara yang saling menghasilkan/menguntungkan, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak? Apa saja kendala, konflik dan ketidakcocokan yang mereka hadapi dalam berinteraksi? Bagaimana hal-hal tersebut dapat diatasi? Pada kondisi bagaimanakah perusahaan dan masyarakat lokal mampu bekerja sama? Serta bagaimana caranya interaksi masyarakat lokal dan pengelola konsesi dapat saling menguntungkan?

Rangkaian pertanyaan yang ke tiga terkait dengan pengelolaan konflik antara masyarakat dan perusahaan kayu. Ketika terjadi konflik hak kepemilikan antara masyarakat dan konsesi, cara apakah yang ditempuh oleh masyarakat selama ini dalam mempertahankan klaim mereka? Bagaimana cara pengaturannya dan keberhasilan

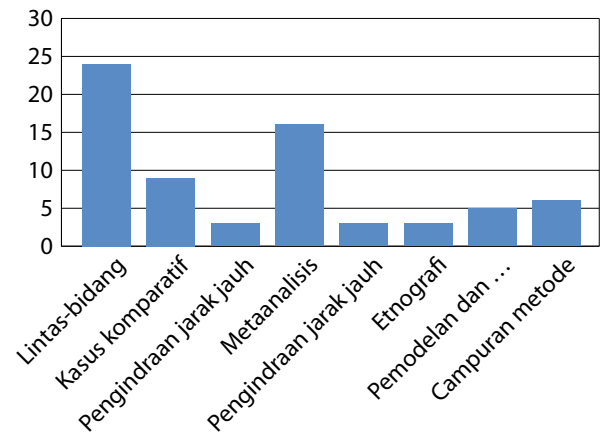
apa yang mereka peroleh? Hambatan apa yang mereka alami? Sebaliknya, bagaimana perusahaan menghadapi aksi-aksi masyarakat lokal? Apa yang telah (ataupun tidak) dilakukan oleh berbagai perusahaan tersebut untuk memperkuat hak kepemilikan/akses masyarakat lokal?

Pertanyaan terakhir yang kami bahas dalam diskusi dan kesimpulan tinjauan ini adalah bagaimana agar kebijakan dan strategi pengelolaan konsesi dapat ditingkatkan sehubungan dengan ketiga rangkaian pertanyaan tersebut di atas. Dan yang terpenting, peluang penelitian dan hipotesis baru apakah yang dapat ditawarkan berdasarkan tinjauan ini sehubungan dengan pengelolaan konsesi?

2.2 Kriteria Studi dan Ruang Lingkup Penelusuran

Pemilihan sejumlah studi untuk bahan tinjauan ini dilakukan dengan menerapkan tiga kriteria. Studi yang dipilih setidaknya harus memenuhi dua dari tiga kondisi berikut ini 1) memiliki relevansi tinggi untuk pengelolaan konsesi kayu ATAU bagi pengelolaan hutan masyarakat secara umum, 2) menyajikan data primer DAN/ ATAU melaksanakan analisis primer dari data yang ada, ATAU 3) memiliki relevansi menurut penilaian CIFOR.

Kami melakukan penelusuran pada ISI Web of Knowledge, ScienceDirect, Springerlink, dan Google scholar. Termasuk dalam istilah penelusuran adalah “community forest management”, “forest concessions community impacts”, “timber concessions community impacts”, “community company forest conflict”, dan “decentralized community forest management” (“pengelolaan hutan masyarakat”, “dampak konsesi hutan pada masyarakat”, “dampak konsesi kayu pada masyarakat”, “konflik hutan masyarakat-perusahaan”, dan “pengelolaan hutan masyarakat terdesentralisasi”), juga kombinasi dari istilah-istilah tersebut. Penelusuran ini memunculkan 928 temuan, dengan kaitan yang beragam untuk studi ini. Setelah mengamati judul-judul penelitian tersebut, kami memilih 200 penelitian yang nampaknya paling relevan. Kami membaca abstrak dari kedua ratus penelitian tersebut dan memilih



Gambar 1. Berbagai metodologi dari studi yang digunakan

sebanyak 46 penelitian yang memenuhi kriteria dan dimasukkan ke dalam tinjauan sistematis ini. Sebagai tambahan, sebanyak 24 penelitian juga dimasukkan atas saran CIFOR dan para peneliti terkait yang mengulas draf awal dari laporan ini. Publikasi tersebut dirinci pada Tabel 1 dalam Lampiran.

Sebanyak 70 penelitian yang dimasukkan dalam tinjauan ini mewakili berbagai jenis metodologi. Survei lintas bidang dan kuesioner, studi kasus yang menggunakan fokus grup dan lokakarya, studi kasus komparatif yang luas, semuanya terwakili dengan baik. Di sini dikutip juga berbagai metaanalisis dan penelitian yang menilai data dari pemerintah dan sumber-sumber lain. Selain itu dimasukkan juga beberapa metode penelitian etnografi, studi pengindraan jarak jauh dan metode kombinasi. Gambar 1 menyajikan metodologi dari sejumlah penelitian tersebut, dan Tabel 1 (Lampiran) menyajikan rincian dari semua penelitian yang dimasukkan dalam tinjauan ini.

2.3 Metode Tinjauan Sistematis

Kami memulai tinjauan terhadap studi yang sudah dipilih dengan mengidentifikasi temuan utama penelitian tersebut dalam kaitannya dengan pertanyaan yang merupakan kepentingan tinjauan ini. Berdasarkan hasil dari tahap pertama, kami melakukan identifikasi kemungkinan kesenjangan pengetahuan yang relevan untuk masing-masing pertanyaan. Dalam menilai isi dan temuan utama dari masing-masing dokumen,

kami juga mengamati pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk komponen tinjauan ini kami mengikuti pedoman untuk tinjauan sistematis yang dipublikasikan oleh Centre for Evidence-Based Conservation, 2010¹ dan menerapkan dua kriteria utama dalam menilai metode penelitian: 1) reliabilitas (keandalan) dan 2) validitas.

Yang kami maksud dengan **Reliabilitas** adalah ukuran sampai di mana metode yang digunakan akan menghasilkan keluaran yang konsisten, dengan berbagai aplikasi. **Validitas** adalah tingkat di mana konsep ketertarikan dapat diukur dengan tepat. Khususnya, kami memfokuskan pengukuran kami pada validitas *internal* penelitian (validitas *eksternal* memerlukan akses terhadap rincian metodologi penelitian yang diterapkan, dan kami tidak memiliki akses terhadap informasi ini dari

penelitian yang kami tinjau). Dengan menerapkan reliabilitas dan validitas, kami dapat menilai sampai di mana penelitian yang ditinjau berikut hasil temuannya dibatasi oleh bias metodologi yang berbeda-beda, seperti bias pemilihan, bias performa, bias pengukuran atau deteksi dan bias pengurangan² (Centre for Evidence-Based Conservation, 2010).

Bagian selanjutnya dari laporan ini membahas keempat kelompok pertanyaan secara berurutan dan ditutup dengan satu bagian tersendiri mengenai kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi. Masing-masing bagian merupakan pembahasan tentang bagaimana literatur yang ditinjau menjawab pertanyaan yang dimaksud, dilanjutkan dengan penyajian tabulasi hasil dari tinjauan sistematis untuk masing-masing pertanyaan.

1 Pedoman tersedia dalam <http://www.environmentalevidence.org/documents/guidelines.pdf>.

2 Gambar dalam pedoman untuk ulasan sistematis dikembangkan oleh Centre for Evidence-Based Conservation (2010), kami mengacu pada seleksi bias sebagai kesalahan sistematis yang berhubungan dengan pemilihan sumber data, menyebabkan contoh menjadi relatif bias terhadap populasi. Performa bias menjadi salah diperkenalkan sebagai akibat studi itu sendiri, semisal perusahaan kayu merubah perilakunya karena mereka sedang diteliti. Pengukuran bias (deteksi) salah diperkenalkan oleh pengukuran tertentu dari sebuah konsep yang dipakai. Pergeseran bias mengacu pada kesalahan pengenalan saat beberapa data dihilangkan dari penelitian karena alasan sistematis.

3

Pertanyaan 1 Keterampilan dan Keahlian Lokal Apakah yang Penting bagi Pengelolaan Konsesi Kayu?

Berbagai dokumen yang ditinjau menyajikan daftar panjang dari kontribusi potensial pengetahuan lokal bagi pengelolaan konsesi kayu. Dengan menyediakan informasi lokal penting terkait 'waktu dan tempat', masyarakat lokal dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas biaya perencanaan serta implementasi kegiatan yang melibatkan aktor eksternal, termasuk kegiatan konsesi kayu (Ostrom dkk. 1993, Gibson dkk. 2005). Integrasi pengetahuan lokal dan keilmuan ilmiah Barat dapat memfasilitasi keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial konsesi kayu. Seperti dipaparkan oleh Kainer dkk. (2009), pengetahuan ekologi lokal bermanfaat dalam melengkapi pengetahuan Barat, dengan misalnya menyoroti sejumlah variasi ekologis relevan yang ekstrim di mana ilmu pengetahuan Barat akan menekankan tren rata-rata. Di Amazon, kombinasi pengetahuan ekologi lokal dan ilmu pengelolaan Barat terbukti penting dalam menciptakan industri kayu yang efisien dan terintegrasi secara vertikal (Sears dkk. 2007). Antinori dan Bray (2005) menemukan keuntungan yang mirip dengan pemanfaatan bersama dari ilmu pengelolaan Barat tentang pengetahuan lokal produksi kayu di Meksiko. Pengetahuan lokal tentang ekologi dapat membantu para pemegang konsesi dalam mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan untuk wilayah tertentu dari areal konsesi yang dipermasalahkan (misalnya: Thapa dkk. 1995, Carney 2003) dan membantu mengidentifikasi spesies alternatif yang memiliki karakteristik fisik yang diinginkan, yang sama dengan spesies yang saat ini dipanen secara komersial (Turner dkk. 2000). Pengetahuan lokal tentang spesies juga bermanfaat dalam konteks

konsesi kayu yang lain. Lacerda dan Nimmo (2010) mengemukakan bahwa salah satu masalah dalam perencanaan pengelolaan hutan di Brasil, Amazon, adalah tidak akuratnya inventarisasi hutan yang dilakukan para pemegang konsesi komersial. Apabila para pemegang konsesi mempekerjakan anggota masyarakat setempat sebagai para taksonomis, penulis menunjukkan bahwa akurasi inventarisasi hutan bisa lebih baik. Kontribusi penting lain dari pengetahuan lokal, yang nampaknya masih belum dimanfaatkan dalam hubungan ini adalah, pengetahuan tentang konteks sosial setempat. Contoh dari jenis pengetahuan ini adalah bagaimana jejaring kerja sosial beroperasi – siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan lokal tentang kehutanan – dan bentuk strategi pengelolaan hutan apa yang mungkin berfungsi baik pada konteks lokal ini.

Hanya sedikit pembahasan yang dijumpai tentang kemitraan antara pemegang konsesi kayu dengan masyarakat lokal yang menyoroti nilai pengetahuan ekologi lokal dan keahlian lain. Pembahasan tentang penggunaannya dapat ditemui dalam literatur pengelolaan hutan teknis, namun terdapat juga penelitian yang menyetujui bahwa pengetahuan ekologi tradisional berharga dalam mengelola HHNK. Di Indonesia, dengan adanya desentralisasi pemerintahan dan berbagai perubahan terkait dalam kebijakan hutan, dan juga pada hubungan antar pemerintah yang telah terbangun, timbul kepentingan untuk spesifikasi lebih lanjut atas hak kepemilikan lahan konsesi (Barr 2001).

Mengingat beragamnya tumbuhan di areal pengelolaan, keahlian lokal terbukti sangat berharga karena masyarakat memiliki pengetahuan yang unik terkait spesies tertentu (Berkes 2000, Carney 2003). Pengetahuan ekologi tradisional menjadi penting khususnya ketika HHNK memiliki nilai ekonomi. Turner dkk. (2000) menemukan bahwa suku pribumi di British Columbia memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang interaksi antara beberapa komponen yang berbeda pada ekosistem, dengan berbagai pengetahuan tentang spesies lokal. Di Nepal, wanatani sangat bergantung pada pohon penyedia pakan ternak (Thapa dkk. 1995). Produktivitas berbagai pohon ini sangat penting bagi penghidupan masyarakat, sehingga pengelolaan yang lestari atas sumber daya bersama bersifat penting bagi pemangku kepentingan lokal. Interaksi antara pohon dengan tanaman pangan, seperti erosi percikan akan bergantung pada ukuran dan tekstur daun, kerapatan tajuk dan ukuran pohon, para petani memiliki pengetahuan luas terhadap lebih dari 90 pohon, berikut jenis-jenis interaksi yang mungkin terjadi dengan berbagai jenis tanaman. Di Indonesia, hasil-hasil hutan kayu seperti resin gaharu, yang dihasilkan dari pohon *Aquilaria* dan digunakan untuk produksi kosmetik, telah dikelola secara efektif dengan melibatkan masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan khusus (Donovan dan Puri 2004). Di Bolivia Utara, pemanenan kacang Brasil (*Bertholletia excelsa*) pada awalnya dilakukan oleh masyarakat lokal pada lahan konsesi maupun lahan lainnya (Guariguata dkk. 2009). Ribuan mata pencaharian keluarga bergantung pada pengelolaan hasil hutan nonkayu semacam ini (Cronkleton dan Pacheco 2008). Sejak 2003, nilai moneter ekspor kacang Brasil dari Bolivia telah melebihi nilai moneter untuk ekspor kayu (CamaraForestal of Bolivia 2007).

Terdapat juga bukti bahwa masyarakat dapat mengimplementasikan strategi untuk pelestarian, jika terdapat komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Di Ekuador, diskusi antara LSM dan para ahli dari Barat terkait dampak potensial deforestasi terhadap kualitas air telah mendorong masyarakat untuk menata ulang strategi pengelolaan hutan mereka sendiri, yang menyebabkan meningkatnya upaya pelestarian (Becker dan Ghimire 2003).



Gambar 2. Peluang kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan konsesi kayu

Gambar 2 di bawah ini merangkum peran tumpang-tindih masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan konsesi. Sejumlah penelitian yang kami tinjau mengusulkan tiga kategori utama keterampilan dan keahlian yang dapat ditawarkan oleh masyarakat. Pengetahuan ekologi mengacu pada pemahaman tentang iklim dan jenis pohon setempat, demikian juga HHNK yang dapat dikembangkan sebagai hasil bernilai tambah di lahan konsesi. Termasuk dalam pengetahuan sosial adalah kemampuan untuk mengorganisir informasi tentang bagaimana jejaring kerja lokal dan pengambilan keputusan berlangsung, dan memberikan izin sosial kepada perusahaan untuk beroperasi. Pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat, berdasarkan pengetahuan lokal yang dapat diterapkan tentang keruangan waktu dan tempat (Hayek 1945). Kemungkinan ini merupakan pengetahuan berharga tentang hutan, yang hanya dimiliki orang-orang tertentu yang telah lama tinggal di lokasi tersebut. Contohnya adalah, bagian mana dari hutan yang tidak dapat dicapai dengan berjalan kaki, bagaimana berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan cara tercepat sekaligus aman, di mana lokasi rawa yang berbahaya, di mana mencari air yang aman diminum, dan lain sebagainya. Memiliki karyawan dengan pengetahuan semacam itu tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan kayu. Besarnya ukuran lingkaran pada diagram didasarkan pada jumlah penelitian yang mengacu pada jenis kontribusi masyarakat yang bersangkutan.

4

Pertanyaan 2 Bagaimana Caranya agar Interaksi Masyarakat Lokal dan Pengelola Konsesi dapat Saling Menguntungkan?

Ada beberapa cara di mana pemegang konsesi saat ini bekerja sama dengan masyarakat lokal. Nebel dkk. (2003) mengemukakan sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bisnis kehutanan, dan mengajukan suatu bentuk kemitraan dengan perusahaan sebagai suatu strategi untuk menangani tantangan dalam hal kurangnya keahlian teknis dan akses pasar. Nepstad dkk. (2003) berpendapat bahwa kegiatan kehutanan harus dikembangkan di daerah yang dihuni masyarakat, agar dapat memanfaatkan peluang yang saling menguntungkan. Tinjauan ini mengidentifikasi tiga jenis utama kesepakatan kerja sama yang dijabarkan di bawah ini. Pada semua pengaturan yang dijabarkan, dua tantangan yang terus dijumpai dalam mengembangkan kesepakatan yang saling menguntungkan adalah 1) mengidentifikasi wilayah dengan kepentingan yang sama antar berbagai pihak, dan 2) mengukur keberhasilan. Lynam dkk. (2007) mengusulkan sebuah rangkaian instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat mengatasi tantangan ini, dan oleh karena itu akan membentuk dasar untuk menciptakan kemitraan yang lebih berkesetaraan.

4.1 Kesepakatan Pembagian Keuntungan

Kesepakatan ini menyediakan peluang untuk membagi keuntungan antara anggota masyarakat setempat. Kesepakatan ini biasanya berfungsi baik sehingga bagian tertentu dari keuntungan tahunan konsesi kayu dibayarkan kepada perwakilan masyarakat. Variasi lain dari kesepakatan ini

adalah pembayaran dalam jumlah tertentu pada setiap selang waktu tertentu atau pembayaran yang dilakukan satu kali. Jenis lain dari kesepakatan pembagian keuntungan menyediakan suatu kontribusi tertentu, baik dalam bentuk uang maupun bukan uang, atas keuntungan dari proyek, tanpa mempertimbangkan kinerja konsesi kayu (World Bank 2009, Mayers dan Vermeulen 2002). Kontribusi semacam itu dapat melibatkan beberapa macam pekerjaan, atau pembangunan sarana publik, sekolah, klinik kesehatan, dan lain-lain (Nawir dkk. 2003). Sebagian besar penelitian menyoroti bahwa kesepakatan pembagian keuntungan dengan skema pembayaran periodik akan membuahkan hubungan yang lebih baik karena mereka menyediakan insentif yang lebih kuat untuk kerja sama kedua belah pihak (misalnya lihat Palmer 2004). Pembagian keuntungan telah tercatat di beberapa konteks geografis. Hal ini telah tercatat di Indonesia (Nawir dkk. 2003, Barr 2001), di Afrika Timur dan Tengah (Perez dkk. 2005, Marfo dkk. 2010), dan di Amerika Latin (Mayers dan Vermeulen 2002). Permasalahan terkait kesepakatan pembagian keuntungan juga telah teridentifikasi. Contohnya, di Amazon, Medina dkk. (2006) menemukan bahwa kesepakatan pembagian keuntungan yang sejauh ini merupakan bentuk kemitraan yang paling umum dijumpai di lokasi penelitian, hanya memberikan keuntungan yang sangat kecil per rumah tangga. Distribusi keuntungan yang tidak adil di masyarakat juga telah teramati (Tokede dkk. 2005, Sommerville 2010). Pada kasus yang terakhir, sejumlah kaum elit cenderung mengambil bagian keuntungan yang tidak proporsional, atau pembayaran kompensasi

tidak sampai ke masyarakat yang pada akhirnya menderita kerugian terbesar akibat pengaturan tersebut. Penelitian-penelitian yang ada sering kali mengacu pada terjadinya pengambilan keuntungan yang lazim dilakukan oleh kaum elit, namun hanya sedikit yang menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan dalam kondisi bagaimana hal tersebut dapat dikurangi. Kami berpendapat bahwa ini merupakan satu kesenjangan pengetahuan utama yang perlu dijawab oleh penelitian di masa mendatang.

Adanya celah dalam perpajakan dan tata kelola yang lemah dapat menyebabkan perusahaan tidak membayarkan jumlah yang seharusnya mereka bayarkan jika hak masyarakat sudah lebih jelas (Samsu 2004). Skema pembagian keuntungan merupakan mekanisme yang bermanfaat untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat karena hilangnya penggunaan lahan yang bersaing dengan usaha produksi kayu. Lebih lanjut lagi, pembagian keuntungan dapat diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, dengan kemungkinan untuk dimodifikasi sesuai dengan situasi tertentu.

4.2 Kesepakatan Pengelolaan Bersama atau Produksi Bersama

Kesepakatan ini merupakan kontrak yang memberikan tanggung jawab spesifik pengelolaan hutan kepada anggota masyarakat dan merinci kompensasi terkait pelaksanaan tugas tersebut. Seperti halnya pembagian keuntungan, pengelolaan bersama merupakan suatu kategori luas dari berbagai bentuk pengaturan antara pemegang konsesi dan masyarakat. Nawir dkk. (2003) menggambarkan para petani pohon di Indonesia sebagai pihak yang aktif mengelola sumber daya kayu bersama dengan para pemegang konsesi hutan. Dalam situasi ini, para petani pohon menjual produk mereka kepada para pemegang konsesi dengan harga yang telah disepakati. Studi kasus yang disajikan oleh Nawir dkk. mewakili skema pembagian keuntungan maupun pengelolaan bersama, yang mengindikasikan bahwa tipe-tipe pengaturan kerjasama tersebut tidak saling berdiri sendiri.

Secara umum, terdapat cakupan luas dari berbagai strategi lain dalam hal pengelolaan bersama. Di

Jawa Barat, pemerintah mendukung partisipasi masyarakat dalam hampir semua aspek tata kelola hutan. Mereka mengelola sistem untuk wanatani, memantau pembalakan liar dan pencurian, memeriksa fasilitas produksi kayu, dan sepakat untuk bertindak dalam rangka konservasi hutan (Mayers dan Vermeulen 2002). Di tempat lain, masyarakat berpartisipasi dengan jalan hanya mengelola aspek tertentu saja dari tata kelola hutan, seperti perburuan (Vermeulen dkk. 2009), yang berdampak pada keanekaragaman hayati, yang terjadi ketika pembalakan tidak dikelola dengan baik (Van Vliet and Nasi 2008, Meijaard dkk. 2006). Bertentangan dengan kedua sistem tersebut, hutan di Kanada sering kali dikelola secara keseluruhan oleh masyarakat pribumi yang telah membentuk perusahaan mereka sendiri (Mayers dan Vermeulen 2002). Ros-Tonen dkk. (2008) mempelajari sebuah variasi kemitraan masyarakat-perusahaan di Brasil Amazon, yang membedakan adanya kemitraan yang berorientasi politik, berorientasi hasil dan multisektor. Mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat *dapat* mengambil keuntungan dari kegiatan pengelolaan bersama, seperti produksi masyarakat atas HHNK, seperti minyak kacang Brasil dan buah *açai*, selama pengaturan kelembagaannya berdasarkan efektivitas biaya dan keuntungan kotornya mencukupi untuk semua pemangku kepentingan.

4.3 Skema Pengelolaan Kemitraan Hutan Tanaman (*Outgrower*)

Para pemegang konsesi juga dapat menyelenggarakan skema kemitraan hutan tanaman, yaitu kesepakatan berdasarkan kontrak yang meminta anggota masyarakat untuk menjual hasil yang dipanen dari lahan individual ataupun lahan masyarakat kepada para pemegang konsesi dengan harga yang telah disepakati (Vidal 2004). Skema kemitraan hutan tanaman telah digunakan pada berbagai variasi konteks, ketika dikaitkan dengan pengaturan pengelolaan bersama dan pembagian keuntungan yang lain (namun lihat FAO 2001). Skema kemitraan hutan tanaman umum diterapkan di Amerika Selatan (Mayers dan Vermeulen 2002). Dalam pengaturan ini, perusahaan membantu anggota masyarakat dengan menyediakan jaringan pasar dan kemampuan

produksi untuk berpartisipasi secara langsung dalam produksi kayu. Anggota masyarakat kemudian dapat menanam pohon atau mengelola hutan alam mereka yang masih ada, dan mengelola hutan tersebut dengan tujuan untuk menjual setidaknya sebagian dari hasil panen ke perusahaan pengelola skema tersebut. Pengaturan semacam itu lebih maju dari pembagian keuntungan sederhana, di mana anggota masyarakat tidak hanya menerima kompensasi atas pemanfaatan lahan atau kayu yang dihasilkan oleh perusahaan, namun mereka lebih memiliki kendali atas proses pengelolaan dan pemanenan (Vidal 2004). Perusahaan diuntungkan dari pengaturan ini, seperti halnya pengaturan lain, dengan memperoleh akses terhadap lahan dan bahan baku yang tidak dapat diakses sebelumnya. Anggota masyarakat memperoleh keuntungan dari penerimaan atas penjualan kayu, dan memperoleh manfaat tambahan, misalnya dari tanaman tumpang sari berupa kacang-kacangan. Walaupun akses pasar merupakan kondisi yang diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam bisnis budidaya pohon, kemungkinan hal tersebut tidak akan cukup untuk menghasilkan keuntungan.

Tanpa adanya akses terhadap kredit, misalnya, masyarakat mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat investasi yang dibutuhkan untuk produksi yang efektif biaya (Pokorny 2008, Sikor 2004, World Bank 2009).

Ada beberapa manfaat logis yang dapat diperoleh masyarakat dan perusahaan melalui pengaturan kemitraan ini. Mayers dan Vermeulen (2002) menyimpulkan sejumlah besar keuntungan ini (Tabel 1). Dari sudut pandang perusahaan, termasuk dalam keuntungan ini adalah peningkatan modal sosial untuk meningkatkan stabilitas operasi, memperkuat citra perusahaan nasional maupun internasional untuk usaha di masa mendatang, dan memperoleh kelayakan untuk program sertifikasi hutan yang diperlukan untuk berpartisipasi di pasar internasional (Nawir dkk. 2003).

Masyarakat juga dapat menarik manfaat dari perolehan peluang pekerjaan dan terkadang dengan berbagi pendapatan dari kayu di areal tersebut (World Bank 2009). Termasuk dalam

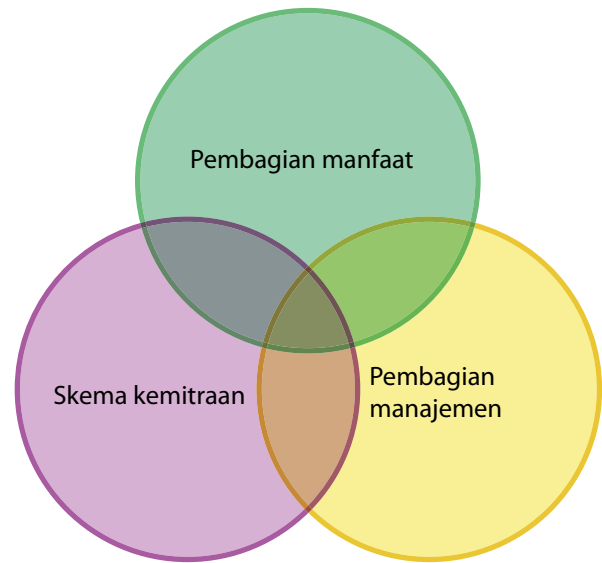
Table 1. Manfaat kemitraan konsesi-masyarakat

Manfaat Kemitraan	Deskripsi
Integrasi ke dalam ekonomi lokal	Dibandingkan dengan perusahaan besar, produsen lokal memiliki tingkat kepercayaan dan legitimasi yang tinggi di antara anggota masyarakat, dan dapat mempekerjakan masyarakat lokal di daerah terpencil dengan peluang yang terbatas.
Biaya alternatif yang lebih rendah	Produsen pada tingkat masyarakat dapat menyediakan hasil hutan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pemasok besar, yang disebabkan oleh lebih rendahnya biaya alternatif lahan dan tenaga kerja.
Produksi bersama	Para petani kecil dapat menghasilkan produk dengan biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan produsen besar, dengan menghasilkan kayu bersama tanaman pangan dan ternak pada lahan yang sama.
Fleksibilitas, adaptabilitas dan pengetahuan lokal	Para petani kecil sering kali memiliki kelebihan dalam beradaptasi dengan berubahnya situasi setempat. Pengetahuan ekologi dapat mengurangi biaya pengelolaan.
Pandangan jangka panjang	Masyarakat dengan ikatan teritorial yang kuat kemungkinan akan kompetitif dalam kehutanan yang baik, karena adanya pandangan yang lebih jauh, keinginan untuk menghindari siklus yang meledak dan merugikan, serta untuk memperkuat aset bagi anak-anak mereka.
Pencitraan	Produsen lokal dapat memperoleh keuntungan pasar dengan pencitraan untuk pasar-pasar tertentu, atau memungkinkan sertifikasi sosial bagi konsumen dan investor yang sensitif terhadap tanggung jawab dan reputasi sosial.

Sumber: Mayers dan Vermeulen (2002:9)

manfaat lain adalah potensi yang lebih besar atas penerimaan yang diperoleh dari sejumlah input, diversifikasi produksi dengan memungkinkan dikembangkannya HHNK, peningkatan kepastian hak atas lahan, dan meningkatkan infrastruktur (Mayers dan Vermulen 2002). Jalan, infrastruktur dan jasa sosial yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi insentif kuat bagi masyarakat untuk bergabung dalam kemitraan (Nawir dkk. 2003). Kontrak yang efektif untuk menjamin terjaganya insentif tersebut sangat penting untuk pengaturan semacam ini.

Namun demikian, tingkat sampai di mana manfaat-manfaat tersebut dapat dijumpai bergantung pada berbagai kondisi. Kontrak yang jelas dan dapat dilaksanakan merupakan alat yang efektif untuk menempatkan semua mitra pada landasan yang sama, ditambah lagi, penelitian baru-baru ini telah menyoroti bahwa saling menghormati, kepercayaan, kepraktisan dan komunikasi merupakan komponen-komponen utama dalam kemitraan yang saling menguntungkan (World Bank 2009). Keuntungan masyarakat akan semakin meningkat jika praktik-praktik perusahaan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, apabila struktur perpajakan memungkinkan pembayaran atas jasa lingkungan dan jika masyarakat memiliki kepastian hak milik (Purnomo dkk. 2003). Penelitian lain menyebutkan bahwa faktor-faktor kelembagaan, seperti halnya tingkat korupsi, kepastian hak kepemilikan dan bantuan kesejahteraan yang sudah ada dapat mempengaruhi hasil dari pengelolaan sumber daya oleh masyarakat. Keller dkk. (2000) menemukan bahwa keadilan, kelestarian dan efisiensi hasil dari pengelolaan sumber daya oleh masyarakat sangat bervariasi. Mereka menemukan bahwa



Gambar 3. Pengaturan yang saling menguntungkan antara perusahaan kayu dan masyarakat

pengelolaan hutan oleh masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi pada daerah-daerah seperti Amerika Utara, namun kurang berhasil di Kenya dan Nepal, yang mengindikasikan bahwa adanya sumber daya tunggal yang dikeluarkan (misalnya satu jenis kayu), dukungan legal yang kuat untuk pengelolaan masyarakat dan infrastruktur organisasi yang terbangun dengan baik, berkontribusi pada perbedaan hasil yang diperoleh. Gambar 3 menunjukkan hubungan antara pengaturan yang saling menguntungkan, menekankan bahwa sering terdapat tumpang-tindih antar mekanisme-mekanisme tersebut, berbagai mekanisme tersebut tidak serta merta saling berdiri sendiri, meskipun terdapat beberapa pengalaman di mana mekanisme-mekanisme ini dikombinasikan di lapangan.

5

Pertanyaan 3

Ketika terjadi peristiwa konflik antara masyarakat dengan konsesi, bagaimana cara masyarakat mengatur untuk mempertahankan klaim mereka?

Terdapat banyak konteks di mana perusahaan memanen kayu dari lahan konsesi, dan sebagai akibatnya dapat timbul beberapa jenis konflik. Literatur yang membahas secara komprehensif konflik antara perusahaan kayu dan masyarakat relatif jarang dijumpai. Bahkan terdapat lebih sedikit lagi informasi tentang jenis konflik yang dapat terjadi khususnya pada lahan konsesi kayu. Dari sejumlah pustaka yang ada, kami mengidentifikasi empat jenis konflik antara masyarakat lokal dan konsesi kayu komersial. Jenis yang pertama terjadi ketika hak masyarakat adat yang sudah lama ada tidak diakui oleh konsesi kayu maupun pemerintah nasional. Pada skenario kasus terburuk ini, masyarakat pedalaman memiliki sedikit pilihan untuk melindungi klaim mereka, dan mungkin tidak punya pilihan lain selain terpaksa menghambat atau bahkan menyabotase konsesi, seperti yang terjadi dalam berbagai kasus di Indonesia (Barr 2001, Palmer 2004). Jenis konflik yang ke dua adalah ketika hukum pemerintah nasional secara resmi mengakui hak sejarah pribumi secara historis, namun penegakan hukum ini lemah, dan mungkin tidak konsisten dengan kebijakan pengalokasian konsesi. Sebagai contoh, pada masa pasca Suharto di Indonesia, lahan konsesi kayu sering kali tumpang-tindih dengan lahan yang diklaim masyarakat, yang memicu terjadinya sengketa lahan (Barr 2001). Jenis konflik yang ke tiga terkait dengan situasi di mana pengakuan terhadap hak masyarakat tidak jelas, sehingga masyarakat melakukan negosiasi dengan pemegang konsesi kayu, namun kemudian masyarakat menjadi frustrasi dengan kurangnya mekanisme yang dapat dilakukan

untuk memastikan proses negosiasi yang adil (Palmer 2004). Terakhir, ketika kesepakatan telah dibuat, jenis konflik keempat yang dapat terjadi adalah ketika tidak terdapat mekanisme yang efektif bagi masyarakat dan perusahaan untuk melaksanakan pembagian keuntungan yang telah disepakati – memastikan bahwa masing-masing pihak mendapat hasil maksimal sesuai dengan kesepakatan (Barr 2001, Palmer 2004).

Ketika konflik antara masyarakat dan perusahaan timbul, ada beberapa penyelesaian yang dapat dilakukan. Pada kasus terburuk, telah terjadi contoh-contoh bentrokan yang sengit dan protes, di mana masyarakat mengalami konflik dengan perusahaan kayu (Palmer 2004, Barr 2001). Meskipun demikian, kemitraan berpotensi menyediakan mekanisme perdamaian untuk penyelesaian konflik, tergantung pada pengaturan kelembagaan, termasuk kekuatan hak kepemilikan, tingkat desentralisasi pemerintah, jenis sumber daya yang diperebutkan, dan struktur masyarakat (Purnomo dkk. 2003, Palmer 2004). Dengan adanya kemitraan, mekanisme yang lebih spesifik tersedia sehingga masyarakat dapat mengatur diri mereka sendiri untuk mempertahankan klaim mereka. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah tawar-menawar langsung, litigasi dan negosiasi melalui pemerintah lokal. Berbagai perantara lain, seperti asosiasi petani, juga dapat menjadi perantara untuk tawar-menawar dan negosiasi (Nawir dkk. 2003). Sejumlah penelitian secara konsisten telah menunjukkan bahwa adanya daya tawar relatif dan kemampuan pemerintah lokal dapat mempengaruhi kemungkinan berhasilnya

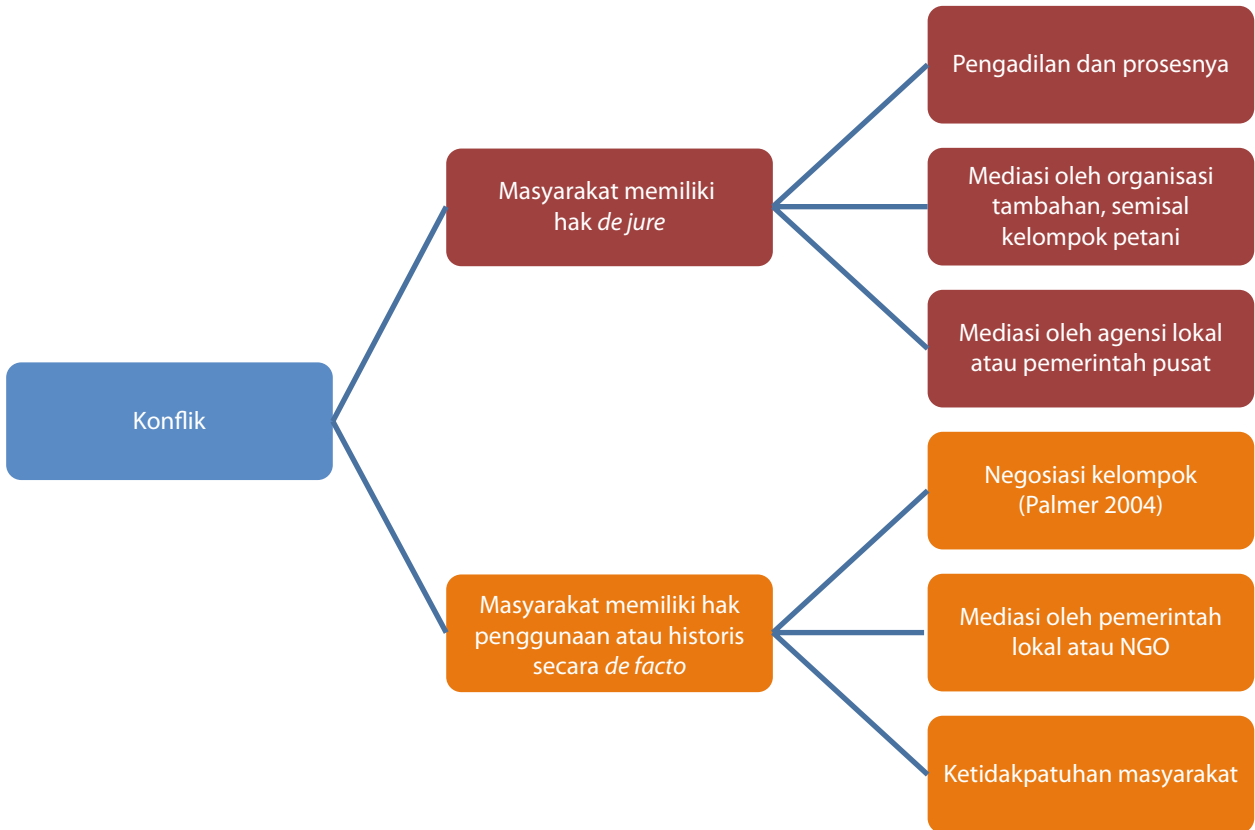
pendekatan ini. Sebagai contoh, Purnomo dkk. (2003) secara eksplisit memodelkan hasil ini berdasarkan tingkat kendali yang terutama dimiliki masyarakat dan perusahaan, dan menemukan bahwa terjadinya tawar-menawar dan litigasi bergantung pada kondisi kelembagaan, seperti kekuatan hak kepemilikan dan reliabilitas pengadilan. Faktor-faktor lain juga mempengaruhi jenis mekanisme resolusi konflik yang digunakan, termasuk seberapa besar kecenderungan masyarakat untuk melakukan aksi bersama (Palmer 2004).

Sampai sejauh mana anggota masyarakat terkait secara kolektif dalam kegiatan pengelolaan hutan sebagiannya bergantung pada konteks kelembagaan. Sebagai contoh, di daerah Amazon pada garis perbatasan Brasil, Merry dkk. (2006) menemukan bahwa asosiasi berbasis masyarakat membentuk suatu pusat penting untuk aksi bersama, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapat manfaat dari kemitraan konsesi – lebih khusus lagi, mereka menemukan bahwa pada tempat-tempat dengan asosiasi yang kuat, kemitraan dengan perusahaan kayu cenderung meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam organisasi tersebut. Faktor kelembagaan lain yang nampaknya penting bagi hasil kemitraan adalah keterlibatan pihak ke tiga. Engel dkk. (2006), dalam sebuah eksplorasi metode teoritis yang menggambarkan efek logis LSM dalam meningkatkan daya tawar masyarakat. Mereka menemukan bahwa meskipun LSM dapat mengintervensi konflik untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan hak masyarakat, namun terdapat juga kemungkinan adanya biaya yang berhubungan dengan perawatan lingkungan yang terkait dengan proses ini, termasuk peningkatan skala degradasi hutan. Hal ini terjadi karena ketika daya tawar masyarakat meningkat (melalui intervensi LSM misalnya), perusahaan kayu harus memberikan bagian yang lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Lebih lanjut lagi, nilai pakai hutan per area juga mungkin akan meningkat melalui proses ini, yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan pembalakan (Mertens dkk. 2001). Untuk mengkompensasi kerugian ini, perusahaan mungkin mencoba untuk meningkatkan pembalakan secara umum, dan masyarakat hanya mendapat sedikit insentif untuk

menentang hal ini. Marfo dkk. (2009) membuat model dari hasil konflik dengan dan tanpa mediasi dari pihak ketiga, seperti halnya LSM, dan menemukan bahwa mediasi LSM juga dapat memperkuat aktor masyarakat.

Kondisi kelembagaan yang saat ini terdapat di masyarakat nampaknya mempengaruhi mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda. Kepemimpinan masyarakat – baik formal maupun informal – telah terbukti menjadi sarana penting dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan pada banyak kasus (Nawir dkk. 2003). Kekuatan pemerintah lokal juga dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan hak mereka, begitu juga dengan keberadaan dan kegiatan LSM. Di sisi lain, ketidakpastian hak kepemilikan dan peruntukan lahan – seperti halnya sistem klasifikasi yang tumpang-tindih dan bermasalah – dan kurangnya kestabilan kelembagaan dapat menyebabkan perusahaan mengambil keuntungan dari lahan konsesi tanpa adanya kompensasi yang sesuai bagi masyarakat (Kartodihardjo 2000). Ndoye dkk. (2003) mengemukakan bahwa terdapat sebuah pendekatan *a priori* untuk penyelesaian konflik. Mereka mendukung dibentuknya sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana masyarakat memperoleh hak kepemilikan hutan yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa hal ini bukan hanya akan menghindari konflik sebelum terwujud, namun juga akan memberikan amunisi *de jure* kepada masyarakat dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan diri terhadap sejumlah kepentingan yang sering kali kuat.

Gambar 4 di bawah ini merinci jenis-jenis mekanisme yang tersedia untuk masyarakat dalam menuntut hak mereka ketika terjadi konflik. Pilihan yang tersedia sebagian besar bergantung pada kawasan kepemilikan lahan yang berlaku. Sebagai contoh, apabila masyarakat memiliki hak atas lahan *de jure* dan prioritas untuk hak pengelolaan, maka instansi pemerintah dan pengadilan dapat digunakan secara aktif untuk menuntut klaim mereka. Di sisi lain, jika tidak terdapat akses *de jure*, mekanisme ini mungkin tidak tersedia, dan mediasi oleh pihak ke tiga, aksi bersama atau bahkan ketidakpatuhan sipil dapat muncul sebagai sarana untuk bernegosiasi.



Gambar 4. Mekanisme bagi masyarakat untuk mempertahankan hak mereka ketika terjadi konflik

6

Pertanyaan 4 Bagaimana cara meningkatkan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan konsesi?

Kemitraan yang saling menguntungkan antar kelompok pengguna hutan lokal dan pemegang konsesi kemungkinan besar tidak akan terwujud tanpa kebijakan publik yang mendorong kesepakatan tersebut secara aktif. Dukungan pemerintah atas pembagian keuntungan yang lebih berkesetaraan dalam konteks ini haruslah lebih dari sekadar retorika dan membentuk standar peraturan bagi kemitraan konsesi dan masyarakat (walaupun kedua jenis dukungan ini mungkin akan membantu) dan menindaklanjuti beberapa alasan mendasar mengapa kelompok pengguna hutan setempat sering kali berada pada posisi yang dirugikan dan sulit untuk melakukan negosiasi. Terdapat beberapa intervensi kebijakan yang dapat membantu mencapai posisi tawar yang kuat bagi masyarakat lokal. Berdasarkan pengalaman reformasi kebijakan yang ada dalam variasi konteks nasional, kami membahas tiga jenis intervensi: 1) Reformasi hak kepemilikan, 2) Kebijakan desentralisasi, 3) Peraturan dan standar yang terpusat.

6.1 Reformasi Hak Kepemilikan

Alasan paling penting mengapa kelompok pengguna hutan lokal sering berada pada posisi yang dirugikan ketika mereka berinteraksi dengan konsesi perusahaan kayu adalah tidak adanya hak kepemilikan yang jelas dan pasti (Larson dkk. 2010). Tanpa hak kepemilikan yang jelas, maka masyarakat dapat dieksploitasi, dan kemungkinan terjadinya konflik lebih besar. Pada kasus di Fiji, Murti dan Boydell (2008) menemukan bahwa pada awalnya konflik terjadi karena ketidakjelasan

hak kepemilikan lahan, dan bahwa konflik-konflik tersebut telah menyebabkan konsekuensi lingkungan dan sosial yang merugikan dan serius.

Mungkin peran terpenting pemerintah pada semua tingkat adalah untuk mengurangi ketidakjelasan dalam hal spesifikasi, alokasi dan penegakan hak-hak kepemilikan untuk setiap hutan. Ketika masyarakat lokal tidak memiliki hak *de jure* yang terkait dengan hak *de facto* mereka, dan pihak luar tidak melihat dengan jelas hak lokal, maka yang umum terjadi adalah pemegang konsesi memanen dan mengambil keuntungan dari sumber daya tanpa memberi imbalan pada masyarakat yang secara *de facto* merupakan pengelola lahan tersebut (Kartodihardjo 2000, Kellert dkk. 2000). Ketika terdapat kejelasan hak atas masyarakat lokal dan pemanfaatan hutan oleh mereka, meskipun lemah, maka terdapat bukti yang menunjukkan bahwa intervensi pemerintah lokal maupun LSM dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat (Engel dkk. 2006, Andersson 2004, 2010).

Di Indonesia, nampaknya kelompok pengguna lokal yang tergabung dalam pengelolaan konsesi bersama dengan rentang waktu yang lebih panjang, seperti halnya pengaturan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), mengalami lebih sedikit ketidakjelasan dan kepastian hak tenurial yang lebih kuat, yang memunculkan insentif yang lebih kuat untuk investasi peningkatan sumber daya berjangka panjang (Iskandar dkk. 2009). Terdapat juga bukti bahwa dengan mengakui hak masyarakat dalam memberikan izin pengelolaan hutan dapat memperkuat kemampuan kelompok

lokal untuk tidak mengikutsertakan pihak luar yang telah mengklaim sumber daya mereka, bahkan jika kelompok lokal tidak mengajukan permohonan untuk izin semacam itu (Kusters dkk. 2007).

Di beberapa negara, pemerintah bergerak lambat dalam memberikan hak kepemilikan *de jure* secara utuh bagi masyarakat lokal (Larson dkk. 2010, Ribot 2002). Bahkan dalam situasi seperti itu, tetap terdapat jalan di mana kebijakan pemerintah dapat membantu mengurangi ketidakpastian terkait tenurial ketika hak konsesi diberikan. Selain mengakui hak *de jure* pengguna lokal hutan, pemerintah dapat memastikan untuk mempertimbangkan batas-batas hak *de facto* pengguna sebelum menentukan batas bagi wilayah konsesi, sehingga menghindari tumpang-tindih hak dan mengurangi risiko sengketa perbatasan antara konsesi dan pengguna hutan lokal. Faktor lain yang mempengaruhi hasil konsesi adalah ukuran konsesi tersebut, dan hal ini sebaiknya dipertimbangkan dalam mengalokasikan hak konsesi (Karsenty dkk. 2008). Pilihan kebijakan lainnya adalah untuk mengalokasikan lahan konsesi masyarakat. Hal ini telah diusahakan di Petén, Guatemala, dan juga di seluruh Bolivia melalui apa yang dikenal dengan Asociaciones Sociales del Lugar (ASL).

Bray dkk. (2008) telah meneliti dampak lingkungan dan sosial dari konsesi masyarakat di Guatemala dengan menggunakan data yang tersedia dan penginderaan jarak jauh, yang bertujuan untuk membandingkan konsesi masyarakat ini terhadap “wilayah yang sangat dilindungi”. Mereka mendapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal deforestasi antara lahan konsesi masyarakat dengan “wilayah yang sangat dilindungi”, namun mengakui bahwa “jaringan bukti” yang terpisah dari penelitian mereka menunjukkan bahwa konsesi masyarakat memiliki hasil ekonomi yang lebih baik (lihat juga Ellis dan Porter-Bolland (2008)). Mereka juga menemukan bahwa masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dari konsesi masyarakat dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari wilayah yang sangat dilindungi, walaupun ini bukan merupakan kesimpulan yang mendasar karena masyarakat tidak dapat mengambil hasil hutan sama sekali

dari wilayah yang sangat dilindungi. Nittler dan Tschinkel (2005) juga mempelajari konteks masyarakat Guatemala. Berdasarkan data yang tersedia mereka menemukan bahwa konsesi masyarakat memberikan lebih banyak keuntungan lingkungan dan sosial, seperti konservasi dan pendapatan, dibandingkan pemanfaatan lahan yang saling bersaing seperti taman nasional dan ‘zona multiguna’. Mereka menemukan bahwa terdapat dua hal penting untuk keberhasilan konsesi masyarakat. Pertama, masyarakat harus bekerja sama. Sering kali masyarakat bersifat heterogen (dengan beragam bahasa pada wilayah yang kecil), dan hal ini dapat menghambat kerjasama. Ketika masyarakat telah bekerja sama untuk membentuk bisnis berbasis hutan, mereka telah memiliki sumber pendapatan dan memperoleh keuntungan. Ke dua, harus terdapat tata kelola yang kuat dan dukungan besar dari pihak luar bagi masyarakat dalam mengembangkan industri mereka. Ezzinede Blas dkk. (2011) menemukan bahwa ketika konflik terjadi terus-menerus, tata kelola yang buruk akan terus berlangsung dan konflik lebih lanjut akan muncul, seperti yang terjadi di Kamerun. Mereka berpendapat bahwa lemahnya tata kelola dari skema pembagian keuntungan serta kurangnya transparansi dalam transaksi dapat menyebabkan konflik lanjutan. Dalam hal ini, tata kelola yang buruk pada tingkat lokal dapat berlangsung terus-menerus dengan sendirinya, dan oleh karena itu pemerintah pusat harus menjadi sarana dalam berbagai strategi untuk meningkatkan kondisi tata kelola lokal.

de Jong dkk. (2006) mempelajari sejumlah konsesi ASL (Asociaciones Sociales del Lugar) di Bolivia untuk mengukur keberhasilannya. Mereka menyimpulkan bahwa ketika terdapat sumber daya yang berharga secara ekonomis, elit lokal maupun pihak luar akan berusaha mengendalikannya. Oleh karena itu, pengelolaan hutan masyarakat melalui konsesi masyarakat sangat rawan untuk diambil alih dan harus dilindungi dengan tata kelola yang ketat. Pacheco (2005) membahas lebih lanjut tentang sejumlah persyaratan ini, masih dalam konteks Bolivia. Penelitiannya menunjukkan bahwa sistem konsesi (ASL) di Bolivia tidak berhasil seperti yang diharapkan karena rumitnya birokrasi. Untuk dapat berpartisipasi, masyarakat harus memenuhi banyak persyaratan, termasuk

membuktikan sebagai penghuni di suatu wilayah dan menunjukkan bahwa sejumlah tertentu dari penghuninya adalah bagian dari kelompok mereka, banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini. Banyak permohonan ASL yang bahkan tidak diproses oleh pemerintah, dan hasilnya adalah pembalakan liar. Keuntungan dari tata pengaturan ini masih belum jelas, dan masih banyak pertanyaan tersisa untuk penelitian lebih lanjut.

Terakhir, bahkan jika transisi dari tenurial saat ini berlanjut – di mana daerah hutan yang dimiliki masyarakat meningkat dengan berkurangnya kepemilikan pemerintah atas sumber daya – dan masyarakat pedalaman memperoleh hak kepemilikan yang jauh lebih jelas dan pasti, ini hanya merupakan langkah awal menuju pembagian keuntungan yang lebih berkesetaraan. Untuk meningkatkan posisi kurang menguntungkan yang telah diwarisi oleh masyarakat penghuni hutan, khususnya dalam hal kurangnya peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia, kami percaya bahwa pemerintah perlu untuk secara aktif mendorong tercapainya ketentuan kerjasama yang lebih setara antara masyarakat lokal dan para pemegang konsesi komersial. Keterlibatan secara aktif dari beberapa pemerintah lokal di Indonesia menunjukkan bagaimana posisi negosiasi masyarakat lokal dapat diperkuat ketika otoritas pemerintah ikut berpihak pada mereka (Obidzinski dan Barr 2001, Palmer 2004). Berperan sebagai ‘pengatur pasif’ saja tidaklah cukup untuk memberikan posisi yang sama kepada masyarakat lokal dalam negosiasi dengan perusahaan kayu.

6.2 Kebijakan Desentralisasi

Ketika pemerintah nasional memutuskan untuk mendesentralisasi pengaturan tata kelola hutan – dengan menransfer hak-hak khusus, tanggung jawab dan sumber daya dari pusat ke tingkat yang lebih lokal – keputusan ini sering mengubah keseimbangan kekuasaan di sektor kehutanan tersebut (Ribot 2002, Larson dkk. 2008). Pada konfigurasi kebijakan yang baru sejumlah aktor yang muncul sebagai akibat dari reformasi desentralisasi, pemerintah lokal menjadi aktor yang lebih penting. Bagi masyarakat lokal, yang mencoba mempertahankan hak dan legitimasi mereka sebagai pengguna hutan, kebijakan bentang alam

yang baru memberikan peluang untuk menciptakan aliansi strategis yang baru dengan otoritas pemerintah yang terdesentralisasi.

Masyarakat lokal dapat memperkuat posisi mereka melalui konsesi perusahaan kayu jika pemerintah lokal, yang diperkuat dengan adanya reformasi desentralisasi, mendukung klaim masyarakat. Namun demikian, kemungkinan hal ini terjadi akan bergantung pada beberapa faktor kontekstual, seperti sejauh mana pemerintah daerah ke bawah bertanggung jawab terhadap kelompok pengguna hutan lokal (Agrawal dan Ribot 1999, Andersson dkk. 2006) dan ke atas bertanggung jawab pada otoritas pemerintah yang mengharapkan agar rezim desentralisasi dapat mendukung sumber daya masyarakat lokal (Andersson 2003). Tanggung jawab ke bawah pemerintah daerah, sebaliknya, difasilitasi oleh pemilihan lokal yang kompetitif dan demokratis, juga tingkat kekuatan organisasi yang mewakili kepentingan kelompok pengguna hutan lokal (Gibson dan Lehoucq 2003, Cerutti dkk. 2010) adapun tanggung jawab ke atas bergantung pada usaha dari atas ke bawah untuk memantau performa lokal (Andersson 2006).

Hal ini berarti bahwa pada tempat-tempat di mana aktor pemerintah daerah dan kepentingan mereka lebih sejalan dengan konsesi kayu, desentralisasi dapat merugikan klaim masyarakat lokal. Arah dari efek reformasi desentralisasi terhadap posisi masyarakat lokal dirangkum menjadi politik lokal dan bagaimana ini akan dimanifestasikan menjadi suatu mekanisme pertanggungjawaban. Lebih khusus lagi, sejauh mana masyarakat lokal akan dapat meyakinkan otoritas pemerintah daerah untuk berdampingan dengan mereka daripada dengan pemegang konsesi kayu sebagian besar bergantung pada sumber daya politik relatif dari pelaku-pelaku yang mewakili politikus lokal.

Walaupun hanya terdapat sedikit dukungan teoretis untuk harapan *a priori* bahwa desentralisasi akan selalu membantu posisi kelompok pengguna lokal, sejumlah penelitian empiris yang telah mempelajari hubungan ini menemukan adanya efek desentralisasi yang sebagian besar positif terhadap posisi kelompok pengguna hutan lokal (Obidzinski dan Barr, 2001, Carney dkk. 2005). Terdapat juga bukti bahwa pemerintah daerah dapat menjadi

mediator bagi kepentingan masyarakat ketika terjadi konflik. Dalam kasus ini, nampak bahwa politikus lokal telah menyadari adanya insentif politik yang lebih kuat untuk mengakomodir kebutuhan dari pemilih yang diwakili oleh kelompok pengguna hutan dibandingkan dengan insentif keuangan yang terkait dengan melayani industri kayu (Marfo dkk. 2010). Namun demikian, temuan ini tidak mewakili kecenderungan umum, dan penyimpulan dampak positif desentralisasi terhadap hasil berkesetaraan dalam hubungan konsesi-masyarakat haruslah dilakukan dengan hati-hati. Dibutuhkan investigasi yang lebih sistematis yang bergantung pada lebih banyak unit contoh yang mewakili dari yurisdiksi lokal untuk membenarkan pola tersebut.

Salah satu isu yang harus dihadapi oleh para reformator di bidang ini adalah kemungkinan terjadinya konflik antara definisi pemerintah daerah dan pusat tentang kawasan hak kepemilikan (Yasmi dkk. 2005). Apabila desentralisasi berhasil membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, maka akan terdapat lebih banyak kelompok pengguna sumber daya lokal yang sebelumnya tersisih dari proses politik, sekarang dapat menuntut dan mempertahankan kawasan hak kepemilikan lahan *de facto* mereka melalui kerjasama dengan otoritas pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat sebagai ancaman terhadap kawasan hak kepemilikan *de jure* dan semua aktor berkuasa yang sudah ada, dan yang mengambil keuntungan dari penguasa yang tengah memerintah (*status quo*). Apabila aktor-aktor penguasa ini terancam, maka kemungkinan konflik yang timbul akan rumit, panjang dan sangat mengganggu para pengguna hutan karena ketidakpastian akan meningkat. Yasmi dkk. (2005) mengemukakan bahwa desentralisasi berlangsung secara tidak seragam, dan dengan hasil yang bervariasi. Lebih khusus lagi, meskipun dalam teori desentralisasi akan meningkatkan akuntabilitas masyarakat dengan menjadikan pemerintah lebih dekat pada mereka, pemerintah daerah juga berisiko kekurangan dana untuk menghantarkan pelayanan yang diperlukan (McCarthy 2001). Sebagai contoh, terdapat kasus di mana mereka menemukan bahwa masyarakat seolah-olah memiliki otonomi terhadap tata kelola hutan, padahal dalam kenyataannya hanya sekelompok kecil elit dan pebisnis yang membuat sejumlah keputusan penting.

Kami melihat adanya dua kemungkinan cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kekuatan dapat dialihkan sampai titik di mana pemerintah daerah secara utuh bertanggung jawab dalam menetapkan dan menata perbatasan konsesi kayu. Hal ini nampaknya tidak akan terjadi mengingat pemerintah pusat akan kehilangan kendali pada salah satu sumber pendapatan terbesar dari sektor kehutanan. Ke dua, dan yang lebih merupakan solusi yang logis, adalah bahwa pemerintah pusat tetap memiliki hak untuk menetapkan konsesi kayu, namun dipersyaratkan untuk memastikan adanya persetujuan dari pemerintah daerah untuk menjamin bahwa tidak terdapat konflik yang bermasalah antar hak kepemilikan *de facto* dan *de jure* di lapangan.

6.3 Peraturan dan Standar yang Terpusat

Untuk melangkah maju pada ketentuan kerja sama yang lebih berkesetaraan antara perusahaan kayu dan masyarakat pengguna lokal, kami memahami bahwa terdapat peran penting yang dimainkan para aktor kebijakan di berbagai tingkat. Beberapa tanggung jawab tata kelola paling baik jika ditangani oleh pemerintah daerah, sedangkan sebagian lagi tidak sesuai. Sebagai contoh, mungkin bukan merupakan hal yang tepat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan apa pun terkait penetapan konsesi kayu pada wilayah mereka, karena dengan demikian akan menghilangkan kemungkinan untuk meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, intervensi yang akan memperkuat posisi kelompok pengguna lokal merupakan kombinasi dari a) peraturan dan standar terpusat tentang pembentukan kemitraan masyarakat dan konsesi, dan b) mandat desentralisasi untuk mendukung dan mengawasi berjalannya kemitraan tersebut.

Peran lain dari standar dan peraturan yang terpusat adalah untuk mendorong kerangka kerja sertifikasi. Ketika program sertifikasi menjadi hal yang diinginkan, posisi tawar masyarakat meningkat, karena perusahaan berusaha untuk memenuhi standar (Nawir dkk. 2003). Sertifikasi dapat menjadi insentif bagi perlindungan hak lokal dan menjamin bahwa terdapat mekanisme penyelesaian konflik dalam konsesi. Secara empiris, kemitraan yang melibatkan aktor-aktor perusahaan telah

terpenuhi dengan berbagai kegiatan yang juga menargetkan sertifikasi (World Bank 2009).

Di Indonesia terdapat dua jenis konsesi. Konsesi IPPK (tidak lagi digunakan pada saat penulisan ini) merupakan konsesi masyarakat yang hanya berlaku beberapa tahun saja. Konsesi HPH merupakan perusahaan konsesi berjangka panjang. Keduanya mempersyaratkan pemenuhan beberapa standar, khususnya terkait dengan hak kepemilikan yang jelas (Kellert dkk. 2000). Lebih lanjut lagi terdapat beberapa standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mengambil kayu dan berhubungan dengan masyarakat, khususnya dalam konsesi HPH (Iskandar dkk. 2009). Oleh karena itu, masyarakat dapat memiliki posisi yang lebih baik untuk menuntut hak kepemilikan ketika pemerintah pusat menerapkan praktik-praktik standar. Jasa lingkungan juga dapat ditingkatkan jika praktik-praktik kelestarian juga dipersyaratkan dan dipantau secara efektif (Boscolo dkk. 2009). Scherr dkk. (2004) berpendapat bahwa pemerintah pusat harus menyediakan bantuan teknis kepada masyarakat untuk memperkuat kapasitas pengelolaan hutan mereka.

Peran lain dari peraturan yang terpusat terkait dengan pengenalan langkah-langkah penanggulangan yang potensial untuk menghindari pengambilan keuntungan oleh elit lokal. Bahkan pada kasus di mana masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan konsesi kayu, keuntungan tersebut mungkin tidak akan mengalir ke masyarakat secara keseluruhan, melainkan ke sejumlah kecil anggota elit. Terdapat bukti empiris bahwa perampasan elit ini merupakan sebuah masalah. Tokede dkk. (2005) menemukan bahwa perampasan oleh para elit merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan mendasar untuk memajukan kemitraan antara masyarakat dan pemegang konsesi: untuk meningkatkan pengembangan masyarakat. Penelitian mereka menemukan bahwa walaupun kemitraan sering kali meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan menyediakan keuntungan jangka pendek yang sangat dibutuhkan, mereka

juga mengamati bahwa “keuntungan yang diperoleh dari penerimaan kayu tidak dibagi secara adil di antara masyarakat lokal dan sejumlah aktor lain yang terlibat dalam bisnis kayu. Sebagai akibatnya, kerjasama masyarakat kehutanan belum berkontribusi bagi pembangunan yang berkesetaraan dan berkelanjutan untuk masyarakat lokal.” Sommerville dkk. (2010) menemukan bahwa program yang mendorong pembayaran untuk jasa lingkungan dapat menghasilkan keuntungan bersih bagi masyarakat. Namun demikian, meskipun secara umum terdapat keuntungan bersih, anggota masyarakat yang memiliki biaya alternatif terbesar, misalnya, pertanian, tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kerugian mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memandang masyarakat sebagai suatu kelompok heterogen dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang saling bersaing secara internal.

Masalah ini dapat merupakan hal yang lazim bagi masyarakat pengguna hutan, namun sekali lagi, terdapat beberapa penelitian sistematis yang mengukur seberapa besar umumnya perampasan oleh sejumlah elit terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (Andersson dan Laerhoven 2007, Platteau 2004). Untuk memastikan adanya hasil yang lebih berkesetaraan dari kemitraan pada tingkat masyarakat, standar yang terpusat yang menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam badan-badan pembuat keputusan setempat, mungkin dapat berperan. Salah satu cara di mana standar untuk pengaturan yang berkesetaraan dapat dilaksanakan dijabarkan oleh Laplante dan Spears (2008). Para penulis berpendapat bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial harus memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*) dari masyarakat sebelum beroperasi. Pemerintah pusat dapat mengambil langkah lebih lanjut dengan memperoleh bukti dari persetujuan tersebut sebelum mengeluarkan izin pembalakan. Namun tantangan terbesar bukan terletak pada pembuatan standar ini, tetapi pada bagaimana pemantauan dan pelaksanaannya di lapangan.

7

Kesimpulan Identifikasi Kesenjangan Pengetahuan

Walaupun beberapa penelitian telah mengamati hubungan antara masyarakat dan pengelola konsesi di berbagai belahan dunia, kesenjangan informasi yang penting masih tetap ada. Pertama, hanya terdapat sejumlah kecil penelitian yang mengamati interaksi antara pengelola konsesi dan masyarakat secara khusus. Lebih lanjut lagi, sebagian besar penelitian yang kami temukan hanya berfokus di Indonesia, dengan banyak wilayah yang telah dipelajari. Oleh karenanya, bidang ini dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari analisis komparatif. Ke dua, ketika beberapa penelitian telah mengamati hubungan ini secara komprehensif, sering kali dijumpai bias. Salah satu penelitian yang paling lengkap tentang bagaimana masyarakat merasakan dampak interaksi dengan para pemegang konsesi (Nawir dkk. 2003) dilaksanakan terhadap tiga perusahaan kayu. Perusahaan-perusahaan ini dipilih di wilayah mereka, sehingga secara sistematis kemungkinan akan berbeda dari pengelola konsesi lain yang tidak dipilih pada penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian lain tentang isu ini tidak memiliki jumlah contoh yang cukup dari masyarakat pribumi dan lokal, penelitian tersebut cenderung mengandalkan pendapat para ahli saja (World Bank 2009). Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya sifat interaksi yang terjadi tetap merupakan hal yang tidak pasti, dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang akan menjawab berbagai pertanyaan ini dengan mengikutsertakan pandangan anggota masyarakat – terlepas dari kesediaan pengelola konsesi untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut.

Di antara sejumlah penelitian yang diamati, Mayers dan Vermeulen (2002) memberikan perlakuan yang paling komprehensif terhadap berbagai kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tantangan terkait, yang dapat dikembangkan antara masyarakat dan perusahaan kayu. Setelah menganalisis kasus-kasus interaksi antara masyarakat dan perusahaan di berbagai belahan dunia, penulis merangkum kondisi-kondisi di mana perusahaan dan masyarakat bisa menang atau kalah, dengan catatan bahwa hasilnya akan berbeda bergantung pada ada-tidaknya kesepakatan. Dalam kondisi bahan baku tidak dapat diakses, atau ketika terdapat risiko tinggi terjadinya resistansi oleh masyarakat, maka kemungkinan perusahaan akan kalah jika tidak terdapat kesepakatan, di sisi lain, perusahaan dapat tetap berada dalam posisi yang baik tanpa membuat kesepakatan apabila hanya terdapat tekanan lemah dari masyarakat, atau jika membeli lahan melalui elit lokal merupakan hal yang mudah. Kebalikan dari situasi ini, perusahaan kemungkinan akan kalah meski terdapat kesepakatan jika biaya transaksi tinggi dan prosesnya sangat rumit, namun mereka dapat mengambil keuntungan dari kesepakatan apabila tata pengaturan tersebut membantu memastikan bahan baku, tenaga kerja, atau 'izin sosial untuk beroperasi' dari masyarakat, konsumen maupun investor.

Masyarakat akan cenderung kalah tanpa adanya kesepakatan apabila hanya terdapat sedikit peluang penghidupan di wilayah tersebut, atau jika tidak ada kemungkinan untuk mengembangkan

lahan/pohon tanpa adanya perusahaan, namun mereka dapat memperoleh keuntungan dari kesepakatan apabila penetapan keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh agenda perusahaan, dan penghidupan tidak dibatasi oleh strategi tunggal (yang dapat menyebabkan peningkatan kerentanan). Situasinya terbalik bagi masyarakat yaitu mereka bisa kalah tanpa adanya kesepakatan, jika mereka terjebak pada ketergantungan atau dicurangi oleh perusahaan, atau ditekan untuk pemanfaatan lahan yang tidak optimal. Dengan adanya kesepakatan, mereka mungkin akan menang dengan memperoleh penerimaan tambahan tanpa adanya peluang lain, atau dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam proyek-proyek pembangunan.

Dengan demikian, kondisi yang mempengaruhi hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan bagi perusahaan terlihat sederhana. Namun demikian, pandangan masyarakat tetap merupakan hal yang kabur, dan tetap tersisa beberapa pertanyaan. Apakah yang menentukan biaya negosiasi bagi masyarakat? Hal apakah yang membuat negosiasi mereka menjadi lebih atau kurang berhasil? Struktur kekuasaan dalam masyarakat yang seperti apakah yang paling sesuai untuk negosiasi tersebut? Sampai sejauh manakah lembaga masyarakat berfungsi untuk menghasilkan suatu hasil, terlepas dari kondisi sosial ekonomi (sampai sejauh mana lembaga masyarakat berpengaruh?). Penelitian lebih lanjut dengan data-data lapangan akan sangat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Topik lain yang belum diteliti adalah bagaimana keuntungan didistribusikan *di dalam* masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat masih tidak terwakili dengan baik dalam literatur pada umumnya, nampaknya pemahaman dinamika pembagian keuntungan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting, dan bagaimana dinamika ini bervariasi dalam masyarakat yang berbeda. Kami memperkirakan bahwa sejumlah elit mengambil keuntungan sampai tingkatan tertentu, namun kondisi yang bagaimanakah yang dapat

memperparah atau menghilangkan efek ini? Lebih lanjut lagi: dengan cara bagaimana pengaturan pembagian keuntungan dalam masyarakat mempengaruhi kemampuan dan insentif bagi mereka untuk aksi bersama? Penelitian tentang kondisi kelembagaan yang mempengaruhi pengambilan keuntungan oleh para elit akan sangat bermanfaat untuk memahami dampak sesungguhnya dari kemitraan masyarakat dan perusahaan. Kemitraan yang nampaknya mengalihkan keuntungan kepada, atau membagi tanggung jawab dengan masyarakat, kemungkinan sebenarnya tidaklah sebaik yang terlihat, apabila anggota masyarakat tidak mendapat pembagian keuntungan yang berkesetaraan. Sebagai tambahan, dampak gender dari kemitraan masyarakat dan perusahaan juga belum dipelajari, namun terdapat bukti bahwa secara umum produksi kayu dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender. Veuthey dan Gerber (2009) mendapatkan bahwa wanita mungkin sama sekali tidak menerima keuntungan dari produksi kayu, dan mungkin menanggung biaya sosial, budaya dan ekonomi yang lebih besar dari industri. Bagaimana kaitan antara kemitraan masyarakat dan perusahaan dengan dinamika gender ini?

Bidang penelitian ke tiga di masa depan adalah peran struktur hak kepemilikan dalam menentukan keberhasilan konsesi. Hak-hak apa sajakah yang ada terhadap sumber daya, dan bagaimanakah hak-hak tersebut dilaksanakan? Sebagai contoh, apakah pemerintah mengalokasikan hak ekstraksi kepada masyarakat ketika mereka sudah memiliki hak atas lahan? Atau apakah hak ekstraksi terpisah dari hak pengguna? Sebuah studi komparatif yang mengamati berbagai tipe hak kepemilikan berbeda yang ditetapkan oleh pemerintah pada lahan konsesi akan sangat membantu memberi arahan bagi pembuat kebijakan. Dalam literatur terdapat bukti bahwa kepastian tenurial lahan mempengaruhi pengelolaan lahan yang lebih baik, namun hanya sedikit yang sudah diketahui tentang tipe-tipe hak kepemilikan yang bagaimanakah yang paling sesuai untuk konsesi hutan.

8

Referensi

- Agrawal, A. 1999 Accountability in decentralization: a framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas* 33(4): 473-502.
- Andersson, K. 2003 What motivates municipal governments? Uncovering the institutional incentives for municipal governance of forest resources in Bolivia. *The Journal of Environment dan Development* 12: 15-27.
- Andersson, K. 2006 Understanding decentralized forest governance: an application of the institutional analysis and development framework. *Sustainability: Science Practice and Policy*, 2(1): 25-35.
- Andersson, K., Benavides, J. P., León, R. dan Uberhuaga, P. 2010 Local self-governance of forests in Bolivia: why do some communities enjoy better forests than others? Working paper. University of Colorado, AS dan CERES, Bolivia.
- Andersson, K. dan van Laerhoven, F. 2007 From local strongman to facilitator. *Comparative political studies* 40(9): 1085.
- Andersson, K. P. 2004 Who talks with whom? The role of repeated interactions in decentralized forest governance. *World Development* 32(2): 233-249.
- Andersson, K. P., Gibson, C. C. dan Lehoucq, F. 2006 Municipal politics and forest governance: Comparative analysis of decentralization in Bolivia and Guatemala. *World Development* 34(3): 576-595.
- Antinori, C. dan Bray, D. B. 2005 Community forest enterprises as entrepreneurial firms: economic and institutional perspectives from Mexico. *World Development* 33(9): 1529-1543.
- Barr, C. 2001 The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau district, East Kalimantan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Barr, C. dan Center for International Forestry Research 2001 Banking on sustainability: structural adjustment and forestry reform in Post-Suharto Indonesia. WWF Macroeconomics Programme Office, Washington, DC dan CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Becker, C. dan Ghimire, K. 2003 Synergy between traditional ecological knowledge and conservation science supports forest preservation in Ecuador. *Conservation Ecology* 8(1): 1.
- Berkes, F., Colding, J. dan Folke, C. 2000 Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications* 10(5): 1251-1262.
- Boscolo, M., Snook, L. dan Quevedo, L. 2009 Adoption of sustainable forest management practices in Bolivian timber concessions: a quantitative assessment. *International Forestry Review* 11(4): 514-523.
- Bray, D. B., Duran, E., Ramos, V. H., Mas, J. F., Velazquez, A., McNab, R. B., Barry, D. dan Radachowsky, J. 2008 Tropical deforestation, community forests and protected areas in the Maya forest. *Ecology and Society* 13(2): 56.
- Carney, D. 1995 Management and supply in agriculture and natural resources: is decentralisation the answer? Overseas Development Institute (ODI), London.
- Cerutti, P. dan Tacconi, L. 2006 Forests, Illegality, and livelihoods in Cameroon. Working paper 35. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Colan, V., Catpo, J., Pokorny, B. dan Sabogal, C. 2007 Costos del aprovechamiento forestal para seis empresas concesionarias en la

- región Ucayali, Amazonía Peruana. *Dalam: Monitoreo de Operaciones de Manejo Forestal en Concesiones con Fines Maderables de la Amazonía Peruana*. CIFOR, Bogor, Indonesia dan INRENA, Pucallpa, Peru.
- Collaboration for Environmental Evidence 2010 Guidelines for Authors <http://www.environmentalevidence.org/Authors.htm#guidelines> (September 2010)
- De Blas, D. E., Ruiz-Pérez, M. dan Vermeulen, C. 2011 Management conflicts in cameroonian community forests. *Ecology and Society* 16(1): 18.
- De Jong, W., Ruiz, S. dan Becker, M. 2006 Conflicts and communal forest management in northern Bolivia. *Forest Policy and Economics* 8(4): 447-457.
- Donovan, D. dan Puri, R. 2004 Learning from traditional knowledge of non-timber forest products: Penan Benalui and the autecology of Aquilaria in Indonesian Borneo. *Ecology and Society* 9(3): 3.
- Douglas, J. dan Simula, M. 2010 *The future of the world's forests: ideas vs ideologies*. Springer, Heidelberg, Jerman.
- Ellis, E. A. dan Porter-Bolland, L. 2008 Is community-based forest management more effective than protected areas? A comparison of land use/land cover change in two neighboring study areas of the Central Yucatan Peninsula, Mexico. *Forest Ecology and Management* 256(11): 1971-1983.
- Engel, S., Lopez, R. dan Palmer, C. 2006 Community-industry contracting over natural resource use in a context of weak property rights: the case of Indonesia. *Environmental and Resource Economics* 33(1) 73-93.
- Engel, S. dan Charles Palmerr, R. L., 2006 Community-Industry contracting over natural resource use in a context of weak property rights: the case of Indonesia. *Environmental and Resource Economics* 33: 73-93.
- FAO 2010 *Forest resource assessment*, FAO, Roma. <http://www.fao.org/forestry/fra/en/> (September 2010).
- Galarza, E. dan La Serna, K. 2005 *Las concesiones forestales en el Perú: ¿ cómo hacerlas sostenibles? La política forestal en la Amazonía andina*. Estudios de caso, Bolivia, Ecuador y Perú, publication du Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Lima, Peru.
- Gibson, C. C., Williams, J. T. dan Ostrom, E. 2005 Local enforcement and better forests. *World Development* 33(2): 273-284.
- Hayek, F. A. 1945 The use of knowledge in society. *The American Economic Review* 35(4): 519-530.
- Iskandar, H., Snook, L. K., Toma, T., MacDicken, K. G. dan Kanninen, M. 2009 A comparison of damage due to logging under different forms of resource access in East Kalimantan, Indonesia. *Dalam: Moeliono M., Wollenberg E. dan Limberg G. (ed.). The decentralization of forest governance: politics, economics and the fight for control of forest in Indonesian Borneo*. Earthscan, London.
- Kainer, K. A., DiGiano, M. L., Duchelle, A. E., Wadt, L. H. O., Bruna, E. dan Dain, J. L. 2009 for greater success: local stakeholders and research in tropical biology and conservation. *Biotropica* 41(5): 555-562.
- Karsenty, A., Drigo, I., Piketty, M. dan Singer, B. 2008 Regulating industrial forest concessions in central Africa and South America. *Forest Ecology and Management* 256(7): 1498-1508.
- Kartodihardjo, H. dan Supriono, A. 2000 The impact of sectoral development on natural forest conversion and degradation: The case of timber and tree crop plantations in Indonesia. CIFOR Occasional paper 26(E). CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Kellert, S., Mehta, J., Ebbin, S. dan Lichtenfeld, L. 2000 Community natural resource management: promise, rhetoric, and reality. *Society dan Natural Resources* 13(8): 705-715.
- World Bank 2009 *Rethinking forest partnerships and benefit sharing: Insights on factors and context that make collaborative arrangements work for communities and landowners*. World Bank, Agriculture and Rural Development Department, Washington, DC.
- Kusters, K., de Foresta, H., Ekadinata, A. dan van Noordwijk, M. 2007 Towards solutions for state vs. local community conflicts over forestland: the impact of formal recognition of user rights in Krui, Sumatra, Indonesia. *Human Ecology* 35(4): 427-438.
- Lacerda, A. E. B. d. dan Nimmo, E. R. 2010 Can we really manage tropical forests without knowing the species within? Getting back to the basics of forest management through taxonomy. *Forest Ecology and Management* 259(5): 995-1002.

- Laplante, L. dan Spears, S. 2008 Out of the conflict zone: the case for community consent processes in the extractive sector. *Yale Human Rights and Development Law Journal* 11(69):78-91.
- Larson, A. M. dan Soto, F. 2008 Decentralization of natural resource governance regimes. *Annual Review of Environment and Resources* 33: 213-239.
- Lynam, T., De Jong, W., Sheil, D., Kusumanto, T. dan Evans, K. 2007 A review of tools for incorporating community knowledge, preferences, and values into decision making in natural resources management. *Ecology and Society* 12(1): 5.
- Marfo, E. dan Schanz, H. 2009 Managing logging compensation payment conflicts in Ghana: understanding actor-empowerment and implications for policy intervention. *Land Use Policy* 26(3): 619-629.
- Mayers, J. dan Vermeulen, S. 2002 Company-community forestry partnerships: from raw deals to mutual gains. Instruments for sustainable private sector forestry series. International Institute for Environment and Development, London.
- McCarthy, J. 2001 Decentralisation and forest management in Kapuas district, Central Kalimantan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Medina, G., Pokorny, B. dan Campbell, B. 2009 Community forest management for timber extraction in the Amazon frontier. *International Forestry Review* 11(3): 408-420.
- Meijaard, E., Sheil, D., Nasi, R. dan Stanley, S. E. 2006 Wildlife conservation in Bornean timber concessions. *Ecology and Society* 11(1).
- Mendoza, G. A. dan Prabhu, R. 2000 Multiple criteria decision making approaches to assessing forest sustainability using criteria and indicators: a case study. *Forest Ecology and Management* 131(1-3): 107-126.
- Menton, M., Merry, F. D., Lawrence, A. dan Brown, N. 2009 Company-community logging contracts in Amazonian settlements: impacts on livelihoods and NTFP harvests. *Ecology and Society* 14(1): 39.
- Merry, F., Amacher, G., Macqeen, D., Santos, M. G. D., Lima, E. dan Nepstad, D. 2006 Collective action without collective ownership: community associations and logging on the Amazon frontier. *International Forestry Review* 8(2): 211-221.
- Mertens, B., Forni, E. dan Lambin, E. 2001 Prediction of the impact of logging activities on forest cover: a case-study in the East province of Cameroon. *Journal of environmental management* 62(1): 21-36.
- Murti, R. dan Boydell, S. 2008 Land, conflict and community forestry in Fiji. *Management of Environmental Quality: an International Journal* 19(1): 6-19.
- Nawir, A., Santoso, L. dan Mudhofar, I. 2003 Towards mutually-beneficial company-community partnerships in timber plantation: lessons learnt from Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia. Hal: 55.
- Ndoye, O. dan Tieguhong, J. 2004 Forest resources and rural livelihoods: the conflict between timber and non-timber forest products in the Congo Basin. *Scandinavian journal of forest research* 19: 36-44.
- Nebel, G., Jacobsen, J. B., Quevedo, R. dan Helles, F. 2003 A strategic view of commercially based community forestry in indigenous territories in the lowlands of Bolivia. Paper presented at the International Conference on Rural Livelihood, Forest and Biodiversity, 19 dan 23 Mei 2003, Bonn, Jerman.
- Nepstad, D., Azevedo-Ramos, C. dan Lima, E. 2005 Governing the Amazon timber industry for maximum social and environmental benefits. *Forests, Trees and Livelihoods* 15: 183-192.
- Nittler, J. dan Tschinkel, H. 2005 Community forest management in the Maya Biosphere Reserve of Guatemala: protection through profits. USAID dan SANREM, University of Georgia, AS.
- Obidzinski, K. dan Barr, C. M. 2003 The effects of decentralization on forests and forest industries in Berau District, East Kalimantan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Ostrom, E. dan Gardner, R. 1993 Coping with asymmetries in the commons: self-governing irrigation systems can work. *The Journal of Economic Perspectives* 7(4): 93-112.
- Pacheco, P., De Jong, W. dan Johnson, J. 2010 The evolution of the timber sector in lowland Bolivia: Examining the influence of three disparate policy approaches. *Forest Policy and Economics* 12(4): 271-276.
- Palmer, C. 2004 The role of collective action in determining the benefits from IPPK logging concessions: a case study from Sekatak, East Kalimantan. Working paper 28. CIFOR, Bogor, Indonesia.

- Platteau, J. P. 2004 Monitoring elite capture in community driven development. *Development and Change* 35(2): 223-246.
- Pokorny, B. dan Johnson, J. 2008 Community forestry in the Amazon: the unsolved challenge of forests and the poor. Overseas Development Institute (ODI), London.
- Purnomo, H., Mendoza, G. dan Prabhu, R. 2004 Model for collaborative planning of community-managed resources based on qualitative soft systems approach. *Journal of tropical forest science* 16(1): 106-131.
- Purnomo, H., Mendoza, G., Prabhu, R. dan Yasmi, Y. 2005 Developing multi-stakeholder forest management scenarios: a multi-agent system simulation approach applied in Indonesia. *Forest Policy and Economics* 7(4): 475-491.
- Ribot, J. C. 2003 Democratic decentralisation of natural resources: institutional choice and discretionary power transfers in Sub Saharan Africa. *Public Administration and Development*, 23 (1): 53-65.
- Ros-Tonen, M. A. F., van Andel, T., Morsello, C., Otsuki, K., Rosendo, S. dan Scholz, I. 2008 Forest-related partnerships in Brazilian Amazonia: there is more to sustainable forest management than reduced impact logging. *Forest Ecology and Management* 256(7): 1482-1497.
- Ruiz Pérez, M., Ezzine de Blas, D., Nasi, R., Sayer, J., Sassen, M., Angoué, C. dan Gami, N. 2005 Logging in the Congo Basin: a multi-country characterization of timber companies. *Forest Ecology and Management* 214(1-3): 221-236.
- Sabogal, C., de Jong, W., Pokorny, B. dan Louman, B. 2008 Manejo forestal comunitario en América Latina: experiencias, lecciones aprendidas y retos para el futuro. CIFOR, Bogor, Indonesia. Hal: 274.
- Samsu, K. 2004 Small scale 100 ha logging concessions' contribution to regional finance: case study in Bulungan district. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Scherr, S., White, A. dan Kaimowitz, D. 2004 Making markets work for forest communities. *Dalam: Working forests in the neotropics: conservation through sustainable management*. Hal: 130-155.
- Sears, R., Padoch, C. dan Pinedo-Vasquez, M. 2007 Amazon forestry transformed: integrating knowledge for smallholder timber management in Eastern Brazil. *Human Ecology* 35(6): 697-707.
- Sikor, T. 2004 Conflicting concepts: contested land relations in north-western Vietnam. *Conservation and Society* 2(1): 75-95.
- Sommerville, M., Jones, J. P. G., Rahajaharison, M. dan Milner-Gulland E. J., 2010 The role of fairness and benefit distribution in community-based Payment for Environmental Services interventions: a case study from Menabe, Madagascar. *Ecological Economics* 69(6): 1262-1271.
- Tokede, M. J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. dan Yufuai, M. C. 2005 The impact of special autonomy on Papua's forestry sector: empowering customary communities (masyarakat adat) in decentralized forestry development in Manokwari district. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Turner, N., Ignace, M. dan Ignace, R. 2000 Traditional ecological knowledge and wisdom of aboriginal peoples in British Columbia. *Ecological Applications* 10(5): 1275-1287.
- Van Vliet, N. dan Nasi, R. 2008 Mammal distribution in a Central African logging concession area. *Biodiversity and Conservation* 17(5): 1241-1249.
- Vermeulen, C., Julve, C., Doucet, J. dan Monticelli, D. 2009 Community hunting in logging concessions: towards a management model for Cameroon's dense forests. *Biodiversity and Conservation* 18(10): 2705-2718.
- Veuthey, S. dan Gerber, J. F. 2010 Logging conflicts in Southern Cameroon: a feminist ecological economics perspective. *Ecological Economics* 70(2): 170-177.
- Vidal, N. G. F. 2004 Forest company-community agreements in Brazil: Current status and opportunities for action. *Forest Trends*, Washington, DC.
- Yasmi, Y., dkk. 2005 The complexities of managing forest resources in post-decentralization Indonesia: a case study from Sintang District, West Kalimantan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Walker, D.H., Sinclair, F.L. dan Thapa, B. 1995 Incorporation of indigenous knowledge and perspectives in agroforestry development. *Agroforestry Systems* 30(1-2): 235-248.

Lampiran

Tabel 1. Berbagai metodologi dari sejumlah penelitian yang ditinjau

Pendekatan Metodologis	Penelitian	Wilayah	Unit Analisis	Ukuran Contoh
Survei lintas-bidang dan studi kasus	Andersson 2003	Dataran rendah Bolivia	Pemerintah daerah	50
	Andersson 2004	Dataran rendah Bolivia	Pemerintah daerah	32
	Andersson 2006	Dataran rendah Bolivia	Pemerintah daerah	32
	Andersson 2010	Bolivia	Masyarakat lokal	200
	Andersson dkk. 2006	Bolivia dan Guatemala	Pemerintah daerah	200
	Andersson dan van Laerhoven 2006	Brasil, Chili, Meksiko dan Peru	Pemerintah daerah	390
	Boscolo dkk. 2009	Bolivia	Konsesi	23
	Cerutti dkk. 2010	Kamerun	Dewan Desa	8
	Ezzine de Blas dkk. 2011	Kamerun	Hutan Kemasyarakatan	20
	Gibson dan Lehoucq 2003	Guatemala	Desa	100
	Iskander dkk. 2006	Indonesia	Konsesi (IPPK & HPH)	36
	Lacerda dkk. 2010	Brasil (Hutan Nasional Tapajos)	Identifikasi Botani (Pohon)	222
	McCarthy 2001	Indonesia (Kapuas, Kalimantan Tengah)	Kabupaten dan provinsi/sumber informan utama	3/lebih dari satu (angka tepatnya tidak disebutkan)
	Merry dkk. 2006	Brasil	Rumah tangga	360
	Ndoye dkk. 2003	Delta Sungai Kongo (Kamerun dan negara-negara yang berbatasan)	Pasar/pedagang	25/286
	Obzidinski dan Barr 2001	Indonesia (Berau, Kalimantan Tengah)	(Sumber data) Sumber informan utama	Tidak ada
	Ruiz Perez dkk. 2005	Delta Sungai Kongo (Lima negara anggota ITTO)	Konsesi kayu	31
Samsu dkk. 2004	Indonesia (Bulungu, Kalimantan Timur)	Konsesi IPPK/kabupaten-tahun	618/3	
Sears dkk. 2007 (panel)	Brasil (Timur)	Rumah tangga	12 (dalam 7 tahun)	

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 1. Lanjutan

Pendekatan Metodologis	Penelitian	Wilayah	Unit Analisis	Ukuran Contoh
	Sommerville dkk. 2010	Madagaskar	Perorangan	586
	Thapa dkk. 1995	Nepal	Perorangan (petani)	90
	Tokede dkk. 2005	Papua Nugini	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
	Vidal 2004	Brasil	Perusahaan hasil-hasil hutan	82
	Yasmi dkk. 200	Indonesia (Sintang, Kalimantan Barat)	(Sumber data) Sumber informan utama	71
Studi kasus komparatif	Becker dan Ghimire 2003	Ekuador Barat	Desa/rumah tangga	2/50
	de Jong dkk. 2006	Bolivia	Konflik	3
	Larson dkk. 2008	Brasil, Bolivia, Nikaragua, Guatemala	Hutan regional	7
	Mayers dan Vermeulen 2002	Afrika Selatan, India, Indonesia, Ghana, Papua Nugini, Kanada	Negara (dengan banyak unit analisis di setiap negara)	6 negara; namun di dalamnya terdapat banyak perusahaan dan rumah tangga
	Medina dkk. 2009	Peru, Brasil, Bolivia	Masyarakat	8
	Murti dan Boydeell 2007	Fiji	Konflik	2
	Nawir dkk. 2003	Indonesia (lebih dari satu wilayah)	Kemitraan masyarakat –perusahaan	3
	Nebel dkk. 2003	Bolivia	Skenario kehutanan masyarakat hipotetis	3
	Ros-tonen dkk. 2008	Brasil	Kemitraan masyarakat –perusahaan	5
	World Bank 2009	Afrika, Amerika Latin, Asia Timur, Amerika Utara	Kemitraan masyarakat –perusahaan	29
Pengindraan jarak jauh	Bray dkk. 2008	Hutan Maya (Meksiko dan Guatemala)	Hutan (masyarakat dan dilindungi)	12
	Ellis dan Porter-Bolland 2008	Yucatan (Meksiko)		
	Mertens dkk. 2001	Kamerun (Provinsi Timur)	Plot-plot hutan (50mx50m)	~12 000 000

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 1. Lanjutan

Pendekatan Metodologis	Penelitian	Wilayah	Unit Analisis	Ukuran Contoh
Analisis meta dan data yang tersedia	Antinori dan Bray 2005	Meksiko	Tidak ada	Tidak ada
	Barr 2001	Indonesia	Tidak ada	Tidak ada
	Carney 1995	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Kainer dkk. 2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Karsenty dkk. 2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Kartodihardjo dkk. 2000 (merupakan contoh yang diinginkan dari sejumlah sumber informan utama)	Indonesia	Sumber informan utama	Tidak diketahui
	Kellert dkk. 2000 (perbandingan dari sejumlah studi kasus lintas bidang)	Nepal, Kenya, Amerika Serikat	Perorangan	400 di Nepal, 50 di Kenia, 228 di Amerika Serikat
	Meijaard 2006	Indonesia (Kalimantan)	Tidak ada	Tidak ada
	Nepstead dkk. 2003	Brasil	Tidak ada	Tidak ada
	Nittler dan Tschinkel 2005	Guatemala	Tidak ada	Tidak ada
	Pacheco 2005	Bolivia	Tidak ada	Tidak ada
	Pacheco dkk. 2009	Bolivia	Tidak ada	Tidak ada
	Palmer 2004	Indonesia	Tidak ada	Tidak ada
	Pokorny dan Johnson 2008	Amazon	Tidak ada	Tidak ada
Ribot 2002	Global	Tidak ada	Tidak ada	
Scherr dkk. 2004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
Etnografi	Donovan dan Puri 2004	Indonesia (Kalimantan Timur)	Tidak ada	Tidak ada
	Turner dkk. 2000	Kanada	Tidak ada	Tidak ada
	Veuthey dan Gerber 2009	Kamerun	Perorangan	50
Model dan simulasi	Engel dkk. 2006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Lynam dkk. 2007	Tidak ada	Instrumen penelitian partisipatif	10
	Marfo dkk. 2009	Ghana	Konflik	81
	Purnomo dkk. 2005	Indonesia (Kalimantan Timur)	(Pseudo): Tingkat kolaborasi	(Pseudo): 4
	Vermeulen dkk. 2008	Kamerun	(Pseudo): Skenario kesepakatan perburuan dalam konsesi	(Pseudo): 3

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 1. Lanjutan

Pendekatan Metodologis	Penelitian	Wilayah	Unit Analisis	Ukuran Contoh
Metode Kombinasi	Kusters 2007: Pengindraan jarak jauh dan survei lintas-bidang	Indonesia (Krui)	Wilayah dan pedesaan	4 & 296
	Laplante dan Sears 2008: Studi kasus/etnografi	Peru	Tidak ada	Tidak ada
	Menton dkk. 2009: Lokakarya partisipatif/ catatan harian pemanfaatan sumber daya/ kuesioner panel dua minggu	Brasil, Amazon	Desa/rumah tangga/rumah tangga	5/50/57
	Platteau 2004: Studi kasus/model/ analisis meta	Afrika Barat/generalisasi/ generalisasi	Tidak ada	Tidak ada
	Sikor 2004: Etnografi/wawancara	Vietnam	(Sumber data): Rumah tangga	65
	Van Vliet dan Nasi 2008: Pengindraan jarak jauh/transek	Gabon	Plot transek terpusat (20mx200m)	159

Tabel 2. Penilaian penelitian yang berbasis data

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Andersson 2003	Tinggi – pengambilan contoh acak mewakili populasi dari kotamadya di dataran rendah Bolivia.	Ukuran insentif bersifat cukup langsung, dan validitas internal penelitian ini tinggi.	Tiga faktor kelembagaan – pendanaan pemerintah pusat, pemantauan pemerintah pusat, dan tekanan dari para pemilih – diamati menjadi motivasi untuk tata kelola hutan yang baik oleh petugas kotamadya di Bolivia.
Andersson 2004	Tinggi – contoh adalah perwakilan populasi kotamadya yang menyediakan pelayanan kehutanan di dataran rendah Bolivia.	Ukuran langsung terhadap interaksi antara petugas pemerintah daerah dan organisasi lain yang bekerja pada isu kehutanan. Hasil independen mengukur performa tata kelola yang digunakan.	Frekuensi dari interaksi reguler – horizontal maupun vertikal – merupakan penanda yang kuat tentang performa tata kelola lokal pada sektor kehutanan.
Andersson 2006	Tinggi – contoh diketahui sebagai perwakilan populasi kotamadya yang menyediakan beberapa pelayanan kehutanan di dataran rendah Bolivia.	Ukuran langsung terhadap interaksi antara petugas pemerintah daerah dan organisasi lain yang bekerja pada isu kehutanan.	Frekuensi dari interaksi reguler – horizontal maupun vertikal – merupakan penanda yang kuat tentang performa tata kelola lokal pada sektor kehutanan.
Andersson 2010	Tinggi – contoh diketahui merupakan perwakilan populasi pada hunian di pedalaman Bolivia.	Ukuran langsung terhadap tingkat kepentingan yang ditempatkan oleh masyarakat lokal dalam hubungan dengan berbagai organisasi eksternal seperti LSM, dan petugas pemerintah lokal, regional dan pusat	Masyarakat yang menilai interaksi dengan pemerintah daerah sebagai yang paling penting, memiliki kemungkinan yang lebih signifikan untuk menciptakan pengaturan kelembagaan untuk tata kelola hutan yang bertumbuh dari bawah.
Andersson dkk. 2006	Contoh acak dari pemerintah daerah di Bolivia (n=100) dan di Guatemala (n=100). Galat pengambilan contoh <5 persen. Keterandalan tinggi.	Ukuran insentif bersifat cukup jelas, dan validitas internal penelitian ini tinggi.	Tiga faktor kelembagaan – pendanaan pemerintah pusat, pemantauan pemerintah pusat, dan tekanan dari para pemilih – merupakan motivasi untuk tata kelola hutan yang baik oleh petugas kotamadya di Bolivia.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Andersson dan van Laerhoven 2007	Contoh acak dari pemerintah daerah di Brasil, Chili, Peru dan Meksiko (n=390). Keterandalan menengah sampai tinggi.	Ukuran tidak langsung atas insentif untuk penyediaan dan produksi bersama pelayanan. Validitas cukup tinggi.	Tekanan dari bawah nampaknya merupakan pemicu untuk menjelaskan investasi dalam tata kelola partisipatif.
Becker dan Ghimire 2003	Prosedur pengambilan contoh tidak dilaporkan, sehingga ketelitian/ketidakpastian spesifikasi tidak diketahui. Keterandalan dipertanyakan.	Terdapat validitas rupa. Pada daerah dengan LSM dan tanpa rumah tangga terdapat perilaku konservasi dan pengetahuan ekologis. Hubungan antara hal-hal tersebut dibahas.	Survei lapangan dan observasi dilakukan untuk menentukan dampak dari pembagian informasi tentang konservasi di Ekuador Barat.
Boscolo dkk. 2010	Umumnya tinggi. Contoh konsesi distratifikasi agar mewakili secara geografis. Sebagian besar data merupakan hasil pengamatan, namun sebagian secara subjektif diperoleh dari pengelola konsesi.	Ukuran dari konsep (apakah rencana pengelolaan hutan lestari diterapkan) bersifat langsung, dan penelitian ini memiliki validitas internal yang tinggi.	Sejumlah faktor seperti halnya kedekatan dengan pasar, tenurial pengelola hutan dan bantuan teknis dari pemerintah, semuanya mempengaruhi diterapkannya praktik-praktik yang lestari di Bolivia.
Cerutti dkk. 2010	Keandalan tidak diketahui; prosedur pengambilan contoh untuk delapan dewan yang dijadikan contoh tidak diberikan.	Ukuran konsep memiliki validitas muka yang tinggi (misalnya pentingnya pajak wilayah, sumber-sumber pembuatan keputusan politis).	Walikota dipersalahkan untuk distribusi pajak wilayah yang buruk pada sejumlah desa di Kamerun, namun penulis berpendapat bahwa mereka hanyalah kambing hitam dalam sistem politik yang tidak memiliki akuntabilitas yang cukup.
de Jong dkk. 2006	Tiga macam konflik diteliti di Bolivia, namun keandalan penelitian tidak diketahui karena sejauh mana tingkat keterwakilan contoh tidak dibahas.	Di dalam studi kasus ini, digunakan ukuran yang valid atas konsep yang bersangkutan (keluaran, wilayah yang diminta, wilayah yang diserahkan).	Hak kepemilikan, lembaga, dan keterlibatan negara memainkan peran utama dalam menentukan keluaran konflik atas lahan hutan antara masyarakat dengan perusahaan.
Donovan dan Puri 2004	Pengambilan contoh berdasarkan kemudahan digunakan; para pengumpul hasil hutan nonkayu (HHNK) diwawancara di Kalimantan Indonesia.	Pengumpulan data tentang HHNK dilakukan secara kaku. Pertanyaan tentang penghidupan terkait HHNK memiliki validitas muka.	Masyarakat lokal di Kalimantan diminta memberikan informasi tentang pemanenan hasil hutan nonkayu, dan sejauh mana serta jenis pengetahuan dan keahlian ekologis tradisional yang telah diperoleh.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Ellis dan Porter-Bolland	Pengumpulan data dilakukan melalui Landsat di dua negara bagian di semenanjung Yukatan. Data satelit memiliki keterandalan yang tinggi.	Pengukuran terhadap jarak, populasi, jalan dan perubahan tutupan lahan dilakukan secara langsung. Namun demikian, beberapa variabel yang relevan nampaknya dihilangkan. Validitas tinggi sampai menengah.	Data Landsat digunakan bersamaan dengan data kelembagaan dan sosial ekonomi (jarak menuju jalan/pasar), untuk menentukan kemungkinan deforestasi di dua wilayah di Yukatan Meksiko: Quintana Roo dan Campeche
Ezzine de Blas dkk. 2011	Sejumlah desa distratifikasi untuk mengikutsertakan bioma yang sesuai, pendekatan ini memiliki keterandalan tinggi.	Suatu tipologi konflik yang akurat/kuat dikembangkan sesuai dengan karakteristik konflik yang teramati. Pendekatan ini menghasilkan validitas yang tinggi.	20 desa di Kamerun dijadikan contoh untuk mempelajari konflik. Distribusi rente dan isu kepemimpinan nampaknya merupakan pemicu konflik di wilayah ini.
Gibson dan Lehoucq 2003	Dilakukan pengambilan contoh secara acak terhadap walikota, dan penelitian ini memiliki keandalan yang tinggi.	Dilakukan survei terhadap sejumlah walikota tentang insentif mereka, sehingga terdapat validitas internal yang tinggi pada penelitian ini.	Dukungan pemerintah pusat dan tekanan para pemilih memberi dorongan kepada sejumlah walikota utama di Guatemala untuk mengahrgai konservasi hutan.
Iskander dkk. 2006	Sejumlah plot dalam konsesi dipilih secara acak. Penelitian ini memiliki keterandalan yang tinggi.	Hutan primer dibandingkan dengan hutan bekas tebangan dari HPH dan IPPK. Dampak awal pembalakan kemungkinan belum teramati, dan perbedaan sistematis antara hutan primer dan konsesi yang belum diperhitungkan mungkin membahayakan validitas dari penemuan ini.	Konsesi HPH dan IPPK di Indonesia menyebabkan berbedanya laju deforestasi.
Kellert dkk. 2000	Wilayah penelitian ganda digunakan, dengan ukuran contoh yang besar pada semua area. Keterandalan tinggi.	Pengetahuan, tingkah laku dan keluaran dinilai secara langsung, keberhasilan diukur secara seragam. Terdapat validitas muka.	Tidak terdapat data primer, melainkan sebuah analisis dari enam studi kasus strategi pengelolaan kerjasama/partisipatif di berbagai negara, yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor kelembagaan, ekologi dan organisasional sangat penting dalam menentukan keluaran.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Kusters dkk. 2007	Keandalan sangat tinggi; contoh acak dari masyarakat desa diambil dalam jumlah besar, dan beberapa data dibuktikan keabsahannya melalui pengindraan jarak jauh.	Data memiliki validitas internal yang tinggi, karena adanya pengukuran ganda yang dilakukan pada banyak konsep.	Keputusan tentang pemanfaatan lahan bergantung pada persepsi tentang kepastian tenurial dibandingkan hak kepemilikan <i>de jure</i> pada hutan di Krui, Sumatera, Indonesia.
Lacerda dkk. 2010	Dilakukan penilaian komprehensif atas spesies pohon di hutan Brasil, dan keandalan tinggi.	Ukuran atas nilai PET dikembangkan dengan baik dan tepat, dan memiliki validitas yang tinggi.	Keahlian lokal memiliki risiko kesalahan yang lebih rendah dalam identifikasi pohon dibandingkan ilmu pengetahuan Barat saja.
Larson dkk. 2008	Keandalan tidak diketahui pada masing-masing lokasi, tidak dilaporkan prosedur pengambilan contoh untuk masyarakat, kabupaten dan unit analisis yang lain.	Validitas internal yang tinggi (sejumlah besar konsep pada berbagai wilayah diukur dengan tepat). Lebih jauh lagi penelitian ini memiliki validitas eksternal yang tinggi karena tingginya variabilitas geografis antara banyak kasus.	Hak kepemilikan terlihat penting dalam menentukan keluaran dari hutan untuk masyarakat. Penelitian ini membandingkan beberapa kasus dari sejumlah negara di Amerika Latin.
Marfo dkk. 2010	Pengumpulan data dilakukan di Ghana menggunakan <i>purposive sampling</i> , dan dengan sensus pada satu kasus. Keterandalan tinggi.	Terdapat sejumlah asumsi pada model (belum diperiksa secara langsung dengan literatur). Memiliki validitas tinggi.	Data dikumpulkan dari petani di Ghana tentang interaksi mereka dengan pengelola konsesi. Konflik antara dua aktor tersebut dimodelkan, dengan beberapa strategi seperti mediasi, litigasi, tawar-menawar, arbitrase, koalisi dan lainnya.
Mayers dan Vermeulen 2002	Keterandalan tinggi. 53 contoh diamati secara global. Jumlah kasus mengindikasikan hasil yang dapat diandalkan.	Laporan menggunakan struktur studi kasus. Jumlah studi kasus, dan keragaman wilayah menambah validitas eksternal dari penelitian ini. Validitas tinggi.	Pengaturan kerja sama termasuk kemitraan hutan tanaman, peminjaman konsesi, proyek tanggung jawab sosial perusahaan, usaha patungan dan kontrak masyarakat di beberapa negara diteliti. Ditemukan sejumlah keuntungan bersama pada beragam konteks. Ditemukan bahwa hak kepemilikan yang jelas merupakan kunci utama agar sistem dapat berfungsi dengan baik.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Mccarthy 2001	Keandalan tidak diketahui; prosedur pengambilan contoh untuk para informan utama tidak diberikan; nampaknya data diperoleh dari sumber yang paling mudah diakses.	Data yang tersedia dari pemerintah secara langsung menunjukkan konsep yang dicermati. Validitas internal tinggi.	Desentralisasi telah memperkuat elit lokal di Kalimantan, namun dampaknya bagi para kaum miskin kurang begitu positif. Deforestasi tetap berlanjut meski desentralisasi berjalan di wilayah tersebut.
Medina dkk. 2009	Keterandalan berpotensi rendah (di setiap wilayah, hanya dipilih satu masyarakat dengan masing-masing jenis pengaturan yang relevan)	Validitas internal tinggi (banyak konsep dari banyak wilayah ditegaskan melalui pengukuran ganda), dan keragaman geografis juga memberikan validitas eksternal.	Keuntungan yang diperoleh rumah tangga dari beberapa skema kehutanan dipelajari di Amerika Latin.
Mendoza dan Prabhu 2000	Keterandalan tinggi (contoh yang mewakili sejumlah ahli)	Pendekatan ini memiliki validitas internal yang tinggi mengingat para ahli yang disurvei tentang metodologi memiliki pengetahuan yang sangat tinggi tentang bagaimana cara menilai mereka.	CIFOR Kriteria dan Indikator diuji di lapangan melalui model kriteria pembuatan keputusan ganda, dengan tim ahli di Kalimantan. Tim ini terdiri dari para ahli ekologi, kehutanan, ilmu sosial dan administrator.
Menton dkk. 2009	Keterandalan menengah. Instrumen pengumpulan data awal adalah lokakarya, yang mungkin dapat menarik contoh yang tidak mewakili populasi.	Pendekatan ini memiliki validitas internal yang tinggi, karena konsep yang diukur dalam lokakarya (perilaku berburu terutama) ditriangulasikan terhadap data etnografi.	Kemitraan masyarakat dan perusahaan dinilai menguntungkan bagi rumah tangga di Brasil, menghasilkan pendapatan tanpa merugikan panen HHNK.
Merry dkk. 2006	Keandalan tinggi (contoh acak pada rumah tangga di desa yang diamati)	Pengukuran konsep seperti halnya partisipasi dalam asosiasi dan persepsi atas kualitas asosiasi bersifat langsung dan penelitian ini memiliki validitas tinggi.	Di Amazon Brasil, partisipasi dalam asosiasi masyarakat berkorelasi dengan kontrak pembalakan yang lebih baik dan kepuasan yang lebih tinggi atas cara ini dengan aksi bersama.
Murti dan Boydell 2007	Keterandalan menengah sampai rendah, karena keterwakilan dari dua kasus ini tidak dibahas atau diketahui.	Validitas tinggi mengingat kesimpulan dari penulis; penilaian studi kasus menunjukkan bahwa menghindari konflik merupakan hal yang baik.	Konflik di Fiji dimunculkan untuk menutupi keuntungan hutan agar tidak disadari.
Ndoye dkk. 2003	Keandalan tinggi (contoh acak dari pedagang pada lokasi penelitian)	Nilai ekonomi HHNK diukur melalui survei, dan sampai sejauh mana keuntungan ini diperoleh oleh pedagang diukur secara langsung. Penelitian ini memiliki validitas internal yang tinggi.	Diketahui bahwa HHNK memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat di Delta SungaiKongo, dan pasar kayu tidak dapat menangkap nilai tersebut.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Nebel dkk. 2003	Keterandalan tidak dapat dinilai karena sumber data dan metode pengambilan contoh tidak diinformasikan. Data berasal dari sebuah "konsesi yang efisien dan anonim".	Konsep diukur secara langsung seperti halnya harga, dan penelitian ini memiliki validitas internal yang tinggi.	Peluang untuk pendapatan bagi masyarakat ditelusuri ke atas dan ke bawah rantai produksi dan pemrosesan kayu.
Nawir dkk. 2003	Ukuran contoh yang kecil dari tiga wilayah, keterandalan dapat ditingkatkan dengan studi serupa yang lebih banyak. Terdapat bias pemilihan, karena ketiga perusahaan ini yang memilih untuk berpartisipasi pada penelitian.	Pertanyaan yang diajukan memiliki validitas muka yang tinggi. Alasan untuk dan dampak kolaborasi dijawab secara langsung. Khususnya tidak terdapat kelompok kendali.	Dilakukan tiga studi kasus, terkait dengan tiga pemegang konsesi swasta, di mana penduduk lokal disurvei untuk beragam indikator (pemanfaatan lahan, alasan untuk bergabung dalam pengaturan kerja sama dan lain-lain)
Pacheco dkk. 2010	Kumpulan data dicermati; keterandalan tinggi karena variabel independen (kebijakan) terdokumentasi dengan baik.	Faktor-faktor perancu seperti halnya kondisi ekonomi eksogen disumbunikan. Validitas rendah sampai menengah.	Tidak terdapat data primer; penilaian atas data yang ada tentang kebijakan hutan Bolivia berikut keluarannya.
Palmer 2004	Metodologi tidak sepenuhnya jelas (studi kasus); mengasumsikan data yang tersedia. Keterandalan <i>vis-à-vis</i> sumber informasi yang lain bersifat tidak pasti.		Studi kasus di Kalimantan Timur, penduduk desa dimintai keterangan untuk menentukan dampak desentralisasi dan jenis mekanisme penyelesaian konflik yang ada.
Perez dkk. 2005	Contoh konsesi distratifikasi berdasarkan ukuran dan klasifikasi hukum. 5-6 konsesi dipilih per negara di Delta Sungai Kongo.	Ukuran dan umur konsesi dikaitkan dengan persentase degradasi. Namun demikian, faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan, seperti kedekatan terhadap pasar, konteks institusional, dll. Terdapat validitas muka menengah, dan validitas isi yang umumnya rendah.	Dilakukan pengumpulan data pada konsesi di Delta Kongo relatif terhadap umur dan ukuran. Variabel terkait adalah spesies yang dipanen dan persentase wilayah area yang dipanen.
Purnomo dkk. 2003	Tinggi – Simulasi memberikan spesifikasi ketidakpastian dalam model kolaborasi dengan distribusi yang relatif ketat.	Secara kualitatif, model asumsi tangguh; triangulasi dengan dunia nyata akan diperlukan untuk penilaian validitas lebih lanjut.	Tidak dilakukan pengumpulan data primer, namun pengetahuan yang ada digunakan untuk memodelkan keluaran dari berbagai tingkat kerja sama masyarakat/pemegang konsesi.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Ros-tonen dkk. 2008	Keterandalan mungkin rendah karena hanya satu atau dua kasus yang diinvestigasi untuk masing-masing jenis kemitraan masyarakat-perusahaan.	Validitas internal tinggi. Keuntungan sosial diukur melalui rumah tangga, konsep seperti keadilan diukur dengan mengamati perbedaan antar gender.	Kemitraan yang berorientasi politik antara masyarakat, LSM dan kelompok lain (perusahaan?) diberi penghargaan tentang manfaat yang dicermati. Sebuah studi kasus dari pergerakan yang menentang pembangunan bendungan di Brasil disoroti dalam konteks ini.
Ruiz Perez dkk. 2005	Pengambilan contoh konsesi di Delta Kongo tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan aksesibilitas, kesediaan untuk berpartisipasi, dan kepercayaan pada informasi yang disediakan oleh pemegang konsesi. Sebagai akibat dari prosedur ini, contoh tersebut mungkin tidak dapat diandalkan.	Konsep seperti halnya ukuran dan umur konsesi langsung diukur, dan variabel keluaran termasuk jenis yang dipanen diukur melalui survei; hal ini merupakan ukuran konsep yang sangat valid. Secara umum penelitian ini memiliki validitas internal yang tinggi.	Variabel seperti ukuran dan nasionalisasi konsesi mempengaruhi tekanan yang diberikan pada hutan dan keuntungan yang diperoleh dari hutan di Delta Kongo.
Sears dkk. 2007	12 rumah tangga diamati selama 7 tahun dari contoh awal sebanyak 140. Tidak diketahui alasan untuk pemilihan 12 rumah tangga ini, terlepas dari partisipasi mereka pada kegiatan yang relevan, sehingga sulit untuk menilai keterandalan.	Pendekatan longitudinal dalam menilai pemanfaatan pengetahuan memberikan validitas tinggi.	Mereka menemukan bahwa pengetahuan teknis dan ekologis mendorong pengelolaan hutan yang efektif oleh masyarakat di Amazon Brasil.
Somerville dkk. 2010	Wawancara terstruktur dengan pengguna hutan di Madagaskar (terutama laki-laki). Contoh dipilih berdasarkan kemudahan dengan bantuan dari pemandu; sehingga keterandalan dari penelitian ini menjadi tidak jelas.	Persepsi dipelajari melalui wawancara. Data memiliki validitas muka yang tinggi.	Mereka melakukan survei terhadap anggota masyarakat pada wilayah di bawah skema pengelolaan Durrell – sebuah pembayaran untuk jasa lingkungan, di mana masyarakat mengelola satwa liar, mencegah pembalakan liar dan memastikan tidak adanya pertanian baru. Mereka menemukan bahwa beberapa anggota masyarakat memperoleh keuntungan, sementara sebagian yang lain tidak.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Thapa dkk. 1995	Contoh acak di desa Solma, terdapat kemungkinan ketidakpastian spesifikasi. Keterandalan menengah sampai tinggi.	Validitas eksternal tidak diketahui (apakah petani di tempat lain memiliki pengetahuan yang mirip?), namun konsep (pengetahuan) terkait erat dengan pengukuran – permintaan tentang informasi yang spesifik.	Pengetahuan ekologi para petani tentang sistem wanatani dikumpulkan melalui kuesioner dan inventarisasi ekologis.
Tokede dkk. 2005	Penelitian partisipatif dilakukan di Papua untuk memperoleh dampak konsesi masyarakat, dengan unit contoh rumah tangga dan para elit. Keandalan tinggi.	Terdapat validitas internal yang tinggi karena adanya pengukuran distribusi keuntungan yang sesuai dengan triangulasi dari pengukuran ganda.	Mereka menemukan bahwa walaupun terdapat keuntungan bagi masyarakat Papua ketika terdapat konsesi masyarakat, terdapat juga risiko tinggi bahwa para elit akan merampas keuntungan ini; nampak bahwa pada banyak kasus keuntungan tidak didistribusikan secara adil.
Turner dkk. 2000	Digunakan penarikan contoh berdasarkan kemudahan; keterandalan tidak diketahui atau rendah.	Terdapat validitas muka. Inventarisasi PET dilakukan secara komprehensif.	Meskipun tidak terdapat survei formal atau wawancara yang tercatat pada penelitian tentang pengetahuan ekologis tradisional di Bristish Columbia, data etnografi dikumpulkan melalui pembicaraan dengan para informan utama.
Van Vliet dkk. 2008	Data satwa liar dikumpulkan melalui metodologi transek yang akurat/kuat.	Konsep diukur secara langsung dan penelitian ini memiliki validitas internal yang tinggi.	Mereka menemukan bahwa beberapa jenis satwa liar menghindari jalan sementara sebagian lain tidak; mereka berpendapat bahwa memperhitungkan pola distribusi ini dapat membantu mengurangi dampak pembalakan terhadap keanekaragaman hayati.
Vermeulen dkk. 2009	Prosedur pengambilan contoh yang akurat dengan keterandalan tinggi.	Keluaran dari perburuan diukur langsung dan memberikan validitas internal yang tinggi pada penelitian.	Mereka mengamati pembagian perburuan di wilayah konsesi, dan menemukan bahwa hal tersebut tidak serta merta menurunkan pembalakan, dan keuntungan dari perburuan masyarakat merupakan hal yang belum jelas.

berlanjut ke halaman berikutnya

Table 2. Lanjutan

Sumber	Reliabilitas/Keterandalan	Validitas	Catatan
Vidal 2003	Beberapa perusahaan di Brasil dikelompokkan menurut karakteristik tertentu dan sejumlah contoh acak diteliti. Penelitian ini memiliki keterandalan yang tinggi.	Metodologi survei ini kuat dalam memastikan karakteristik perusahaan yang dinilai penting dalam kemitraan dengan masyarakat.	Program kemitraan hutan tanaman diteliti di Brasil.
World Bank 2010	Terdapat bias pemilihan, sehingga contoh alternatif dapat memberikan hasil yang berbeda. Keterandalan rendah.	Pertanyaan tentang 'apa yang penting' tidak ditriangulasikan melalui beberapa pengukuran/metode ganda, walaupun pengukuran ini memiliki validitas muka.	Survei/wawancara tentang apa yang penting dalam kesepakatan kerja sama; terutama perusahaan dan para ahli LSM.
Yasmi dkk. 2005	Data lapangan dikumpulkan di Kalimantan (Indonesia) untuk menilai dampak konsesi masyarakat terhadap penghidupan.	Penilaian pedalaman secara partisipatif dan cepat (<i>participatory and rapid rural appraisals</i>) digunakan. Terdapat suatu tingkat kemudahan yang digunakan, namun data yang digunakan bersifat komprehensif secara geografis di kecamatan Melawi. Terdapat validitas internal yang tinggi.	Mereka menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak seragam. Walaupun masyarakat telah "diberdayakan", rakyat kebanyakan tidak benar-benar berpartisipasi dalam tata kelola hutan. Elit setempat dan pemerintah tetap mendominasi pembuatan keputusan.

CIFOR Occasional Papers berisi hasil-hasil penelitian yang penting mengenai hutan tropis. Isi dari penelitian ini telah dikaji oleh mitra bestari.

Kendatipun fokus saat ini ditujukan pada tanggung jawab sosial perusahaan, sertifikasi kayu, dan inisiatif perdagangan yang adil (*fair trade*) dalam pasar internasional produk hutan – yaitu inisiatif yang mendorong kesetaraan lebih besar bagi masyarakat yang bergantung pada hutan dalam hubungannya dengan perusahaan swasta – banyak produsen hutan lokal yang kurang beruntung ketika bekerja sama dengan bisnis swasta. Beragamnya hasil dari berbagai kemitraan yang berusaha menciptakan kesepakatan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, yaitu antara masyarakat dan bisnis swasta, masih merupakan teka-teki. Penelitian ini mencari jawaban atas teka-teki tersebut dengan meninjau secara sistematis sejumlah besar penelitian empiris dalam konteks yang beragam. Khususnya, kami meneliti berbagai macam keterampilan dan keahlian lokal yang penting untuk pengelolaan konsesi kayu yang baik, bagaimana masyarakat lokal dan pengelola konsesi dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan, sejumlah strategi yang paling efektif bagi masyarakat untuk mempertahankan klaim mereka dalam konflik dengan perusahaan swasta, dan beberapa kebijakan publik yang mendukung bentuk kerjasama yang lebih adil dalam pengelolaan konsesi hutan. Kami menemukan bahwa pengaturan kelembagaan yang mengatur hubungan antara masyarakat lokal dan pemegang konsesi hutan, dan khususnya distribusi hak kepemilikan secara hukum, dapat membantu menjelaskan beragamnya keluaran tersebut. Terdapat juga bukti yang kurang meyakinkan terhadap perspektif masyarakat tentang hubungan antara konsesi-masyarakat, karena kebanyakan dari penelitian yang ada tidak menganalisis data yang berkaitan dengan anggota masyarakat. Akibatnya, banyak hal belum diketahui tentang strategi yang digunakan masyarakat dalam mengatur pembagian keuntungan internal mereka sendiri, yang berarti bahwa kesepakatan kerjasama secara sosial sekalipun tidak selalu dapat menguntungkan anggota masyarakat yang paling membutuhkan pendapatan. Pada akhir kajian, kami mengusulkan arah penelitian di masa mendatang dan membahas implikasi dari temuan kami bagi kebijakan publik.

www.cifor.org

www.blog.cifor.org



Center for International Forestry Research

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian Internasional (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

